



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Unand.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Unand.

PENGARUH ALIH FUNGSI LAHAN PERTANIAN TERHADAP KETAHANAN PANGAN DI KAB. PASAMAN BARAT

SKRIPSI



**ZAIDA RAHMI
07151097**

**JURUSAN ILMU EKONOMI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG 2011**

FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS ANDALAS

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Dengan ini, Dekan Fakultas Ekonomi, Ketua Jurusan Ilmu Ekonomi, dan pembimbing skripsi menyatakan bahwa:

Nama : **Zaida Rahmi**

No. BP : **07 151 097**

Program Studi : **S-1**

Jurusan : **Ilmu Ekonomi**

Judul skripsi : **Pengaruh Alih Fungsi Lahan Pertanian Terhadap Ketahanan Pangan Di Kab. Pasaman Barat**

Telah diuji dan disetujui skripsinya melalui ujian seminar hasil yang dilakukan pada tanggal 8 Agustus 2011 dan dinyatakan telah lulus.

Padang, September 2011

Pembimbing



Prof. Dr. H. Sjafrizal SE, MA
NIP. 130 365 548

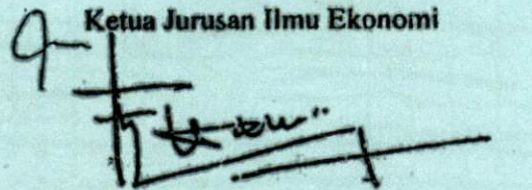
Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi

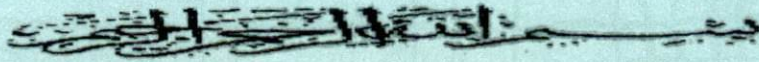


Drs. Saifuldin Karimi, SE, MA
NIP. 130 892 743

Ketua Jurusan Ilmu Ekonomi



Prof. DR. H. Firwan Tun, SE, M.Ec, DEA, Ing
NIP. 130 812 953



Ya Allah Tambahkan kepadaku ilmu pengetahuan (Q.S. Thoha:114),
Barang siapa keluar untuk mencari ilmu maka ia berada di jalan Allah sampai ia
kembali (Hasan, HR. Tirmidzi).

Dan apabila dikatakan kepadamu "berdirilah" maka hendaklah kamu berdiri, niscaya
Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman diantara kamu dan orang-orang
yang diberi ilmu pengetahuan, beberapa derajat. Dan Allah maha mengetahui apa yang
kamu kerjakan.
(Q.S. Al-Mujadallah :11)

Barang siapa yang mengambil jalan untuk mencari ilmu pengetahuan, Allah akan
membimbingnya ke jalan menuju surga.
(H.R Tabrani)

Alhamdulillahirabbil'alamín.....
Alhamdulillah ya Allah.....
Atas sayang yang tak terbilang.....
Atas kasih yang tak memilih.....
Atas hidayah yang selalu melimpah.....
Atas rahmah yang senantiasa tercurah.....

Segala puji dan syukur kepada Allah SWT atas segala nikmat, kesehatan, kemudahan,
rahmat dan hidayah sehingga atas izin Nya-lah hamba diberikan kesempatan untuk
sedikit memberikan kebanggaan bagi kedua orang tua hamba melalui skripsi ini

Untuk Mama,,,,,mama,,,,,mama,,,,tercinta

Dg apa kubalas kasihmu, dg apa kuganti pengorbananmu, dg apa kuseka keringatmu, dan dg apa kubalut luka hatimu. Innilah persembahan kecil yang mampu kuberi atas pengorbanan besar yang telah kulakukan,

Untuk ayah

Terima kasih buat pelajaran hidup yang sangat berharga selama ini, dengan ini aku mampu tegar.

Yuhermita "cimixs", Ainil Yusra "bg Daniel, Zulfadli "bg Ai (gendut)", Zirfani "isar", Raida Hayati "idonk", Fadhil Aulia Dinata "aak", Nadia Lathifa "tifna", Shesy Kirani Aliya Dinata "checy", Dona Gusfitria "ni ana", Purwadianto "bg Pur", David Dasril "bg David", Feny Febrizal "kak Feny", kalianlah yang mengisi lembar kosong hidupku, bersama kalian hidup di dunia ini terasa lebih berwarna.

Semoga kita dipertemukan lagi kelak oleh Allah dalam JannahNya,,,,,,

Amiiiiiiiiin,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

Satu chapter hidupku, ada masa-masa indah yg kan slalu tertulis jelas di ingatanku, senang bisa mengenal kalian semua, menjadi salah satu bagian keluarga besar "EP OF" echi (yg slalu membawa keceriaan bwt kita semua), eno (smoga langgeng sma bg @izn yach ☺), esa (semangat y ndut bwt skripsiny), ina (bsok klu dah blik ke jkerta hrs bsa bhasa minang yach ☺), icha (jgn suka ngmbek lg kyak ank kecil kan skrg dah srjana ☺), ika (klu janji jgn suka ngaret lg yah buk ☺), mahliil (swamiku, hehehe...)

Bwt adi, ayu, tia (lesuik ☺), vivi, mita, wwid, chelsy, @ez, ica, aan, ijul, hendra, wahyu, cees, rezy (gendut ☺), jimmy, kak maya, farid, imenk, ijef, ferdi (babe), dayat, melva, yelma (amak), mike, hanes, teja dan tmnz yg lainnya yg tak mgkn disebutkan satu persatu. Smoga kita semua sukses nantinya, amiiiiin,,,,,

Special bwt:

Kak chie, shabat terbaikq sejak smp, sma, sampai kuliah slalu bersama-sama. Smoga persahabatan kita akan slalu terjaga sampai nanti. Semangat yach kak chie bwt komprenya n bisa jd SE ☺,

Tmn2 KKN (Power Ranger): Cimeq "Anka & Ranger Pink" (tmn yg slalu setia wlu KKN sdh selesai tp persahabatan kita tak akan berhenti hanya sampi disitu), Iwin "Monster" (yg slalu bwt masalah n cari lawan ajah), Iis "Ranger Hitam" (gadis piaman alias cunianke yg salalu membawa keceriaan bwt kami), uli "Ranger Kuning" (cpat pulih yah jeng, jgn malu2 lg yah klu difoto ☺), Fifi "Ranger Biru" (masak yg enak2 lg y bundo), Daus "Ranger Putih" (mulai skrg stop cerita hijau2nya)

"ketika ingin tetap meneruskan hidup berarti harus siap utk disakiti dan menyakiti,
Kupersembahkan juga tulisan ini bwt org2 yg pernah aq sakiti & menyakiti diriku,
jgn pernah ada dendam & jgn pernah ada niat tuk memutuskan silaturahmi,,,,

Bwt smua yg tlah menjadi inspirasiku,,,,

Dan seseorang disana yg stia menantiku,,,,

Terimakasih

Thankyou

Khamsahamida

Arigthou.....

☺ Amie ☺



No. Alumni Universitas

Zaida Rahmi

No. Alumni Fakultas

BIODATA

a) Tempat/tgl lahir : Padang/13 Maret 1989 b) Nama Orang Tua: Yunahar dan Jasiwar Bakar BA c) Fakultas: Ekonomi d) Jurusan: Ilmu Ekonomi e) No.BP: 07151097 f) Tgl lulus: 8 Agustus 2011 g) Predikat lulus: Sangat Memuaskan h) IPK: 3,12 i) Lama Studi: 3 tahun 11 bulan j)Alamat Orang Tua: Jln. Bariang Cubadak Ampo No.4 RT 02 RW 08 Kelurahan Anduring, Kecamatan Kuranji Padang.

PENGARUH ALIH FUNGSI LAHAN PERTANIAN TERHADAP KETAHANAN PANGAN DI KAB. PASAMAN BARAT

*Skripsi S-1 Oleh Zaida Rahmi
Pembimbing Prof.Dr.H. Sjafrizal SE,MA*

ABSTRAK

Skripsi ini membahas tentang pengaruh alih fungsi lahan terhadap ketahanan pangan di Kab. Pasaman Barat yang meliputi periode waktu tahun 2008-2009. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh alih fungsi lahan pertanian dari tanaman pangan/padi menjadi tanaman sawit dan jagung terhadap ketahanan pangan yang dapat dilihat dari perubahan/ Δ produksi kelapa sawit dan Δ produksi jagung terhadap Δ produksi padi di Kab. Pasaman Barat. Untuk itu metodologi yang digunakan adalah OLS (*Ordinary Least Square*) untuk melihat pengaruh kedua variabel tersebut terhadap ketahanan pangan di Kabupaten Pasaman Barat. Data yang digunakan adalah data time section yaitu membandingkan Δ produksi kelapa sawit dan Δ produksi jagung tahun 2008 dengan 2009. Hasil penelitian ini menunjukkan terdapat hubungan yang negatif signifikan antara Δ produksi kelapa sawit dan Δ produksi jagung terhadap Δ produksi padi dan dapat mengancam ketahanan pangan. Oleh karena itu diharapkan pemerintah dapat untuk membatasi dan atau mencegah alih fungsi lahan pertanian yang subur menjadi penggunaan lahan nonpertanian di Kabupaten Pasaman Barat, salah satunya adalah kebijakan program cetak sawah baru.

Skripsi ini telah diseminarkan dan dinyatakan lulus pada tanggal 8 Agustus 2011

Abstrak telah disetujui oleh pembimbing dan pembahas skripsi :

	Pembimbing	Pembahas I	Pembahas II
Tanda Tangan			
Nama Terang	Prof.Dr.H. Sjafrizal SE,MA	Drs. Zamzami Munaf, MA	Prof.Dr.Elfindri, SE,MA

Mengetahui,
Ketua Jurusan

Prof.DR.H. Firwan Tan, SE,M.Ec,DEA,Ing
NIP. 130 812 953

Tanda Tangan

Alumnis telah terdaftar ke Fakultas/ Universitas Andalas dan mendapat nomor alumnus :

	Petugas Fakultas/ Universitas	
Nomor Alumni Fakultas	Nama	Tanda Tangan
Nomor Alumni Universitas	Nama	Tanda Tangan



Assalamu'alaikum Wr. Wb.,

Puji dan syukur *Alhamdulillah* penulis ucapkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan kesehatan, kesabaran, kekuatan, kemudahan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul : "***Pengaruh Alih Fungsi Lahan Pertanian Terhadap Ketahanan Pangan Di Kabupaten Passaman Barat***", yang ditujukan untuk melengkapi persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Andalas.

Dalam menyelesaikan tugas ini, penulis banyak mendapatkan bantuan baik yang bersifat bimbingan, petunjuk maupun kesempatan berdiskusi. Untuk itu penulis menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada :

1. Kedua orang tua tercinta, Ayah dan Mama yang selalu memberikan kekuatan, doa, motivasi, semangat dan semua kebutuhanku dalam penulisan skripsi ini;
2. Bapak Prof.Dr.H. Syafruddin Karimi, SE, MA selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Andalas;
3. Bapak Prof. Dr. H. Firwan Tan, SE, M.Ec.DEA.Ing selaku Ketua Jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Andalas;
4. Bapak Febriandi Prima Putra, SE, M.Si selaku kepala program studi S1 Ilmu Ekonomi;

5. Bapak Prof. Dr. H. Sjafrizal selaku dosen pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktu dan fikiran serta mengarahkan penulis selama penelitian dan penulisan skripsi ini;
6. Bapak Drs. Zamzami Munaf, MA dan Prof.Dr.Elfindri, SE,MA selaku dosen penguji yang telah memberikan saran-saran serta perbaikan skripsi ini;
7. Bapak Edi Ariyanto, SE, M.Si selaku pembimbing akademik yang telah banyak memberikan bantuan dan nasehat dalam penyelesaian studi penulis.
8. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Jurusan Ilmu Ekonomi yang telah banyak memberikan pengetahuannya kepada penulis;
9. Seluruh pegawai biro Jurusan Ilmu Ekonomi serta pegawai Reading Room : Bapak Suryadi yang telah memberikan bantuan dan kemudahan penulis dalam menempuh pendidikan di kampus ini;
10. Seluruh karyawan Badan Pusat Statistik Kota Padang atas kesediaanya meluangkan waktu dan tempat dalam pengambilan data;
11. Saudara tersayang kak ida, kak ani, cimixs, bg fay, bg danil serta keponakan tercinta aak, tifa dan checy atas dukungan, motivasi dan semangatnya.
12. Bagi semua teman-teman Ilmu Ekonomi khususnya angkatan 2007 yang tidak dapat disebutkan satu persatu, penulis mengucapkan terima kasih atas semua persahabatan, semangat, dukungan, dan motivasi yang selalu kalian berikan. Semoga kebersamaan ini terjalin selamanya;
13. Bagi uda, uni Ilmu Ekonomi angkatan 2005 dan 2006 serta adik-adik Ilmu Ekonomi angkatan tahun 2008 dan 2009 yang telah memberikan bantuan, informasi, saran dan masukan dalam proses studi penulis;

14. Serta semua pihak yang telah membantu penulis dalam penelitian ini yang tidak dapat disebutkan satu per satu disini.

Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini dapat berguna bagi semua pihak dalam proses menerapkan ilmu yang penulis dapatkan di bangku kuliah, paling tidak skripsi ini diharapkan mampu membantu kemajuan ilmu pengetahuan. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Untuk lebih menyempurnakan skripsi ini dimasa mendatang, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak dengan harapan agar dapat bermanfaat bagi yang berkepentingan.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Padang, September 2011

Zaida Rahmi

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN	i
ABSTRAK	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL.....	viii
DAFTAR GAMBAR.....	ix
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Penelitian	4
1.4 Manfaat Penelitian.....	5
1.5 Hipotesis.....	5
1.6 Sistematika Penulisan.....	6
BAB II. TINJAUAN LITERATUR	8
2.1 Landasan Teori.....	8
2.1.1 Alih Fungsi Lahan	8
2.1.2 Bid-Rent Theory\.....	11
2.1.3 Fungsi Produksi.....	17
2.1.4 Teori Produksi Pertanian	21
2.2 Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Alih Fungsi Lahan.....	22
2.3 Dampak Alih Fungsi Lahan Pertanian	24
2.4 Konsep Ketahanan Pangan.....	26
2.5 Penelitian Terdahulu	30
BAB III.METODOLOGI PENELITIAN	33
3.1 Jenis dan Sumber Data	33

3.2 Pembentukan Model.....	33
3.3 Defenisi Operasional	34
3.4 Metode Pengolahan dan Analisis Data.....	35
3.5 Pengujian Statistik.....	35
BAB IV. GAMBARAN UMUM.....	38
4.1 Perkembangan Ekonomi Kabupaten Pasaman Barat	38
4.1.1 Perkembangan Sektor Pertanian.....	42
4.1.2 Perkembangan Lahan	44
4.2 Keadaan Geografi.....	47
4.3 Keadaan Penduduk	48
4.4 Produk Domestik Bruto (PDRB).....	49
BAB V. HASIL PENELITIAN DAN IMPLIKASI KEBIJAKAN	55
5.1 Penemuan Empiris.....	55
5.2 Implikasi Kebijakan.....	58
BAB VI. PENUTUP	67
6.1 Kesimpulan	67
6.2 Saran	68
DAFTAR PUSTAKA	69

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Produksi Padi tahun 2000-2009 di Kabupaten Pasaman Barat.....	43
Tabel 4.2 Luas lahan sawah dan pemanfaatannya untuk tanaman jagung di Pasaman Barat Tahun 2007	45
Tabel 4.3 Perubahan Luas areal sawah dalam periode tahun 2005-2007 di Pasaman Barat.....	46
Tabel 4.4 Jumlah penduduk per Kecamatan Tahun 2004	49
Tabel 4.5 PDRB Kabupaten Pasaman Barat atas Harga Konstan 2000 tahun 2004-2009 (Jutaan Rupiah)	53
Tabel 4.6 Perbandingan PDRB Kabupaten Pasaman Barat atas Harga Konstan 2000 dengan PDRB Sumatera Barat tahun 2004-2009 (Milyar Rp)	54

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Lahan sudah menjadi salah satu unsur utama dalam menunjang kelangsungan kehidupan sejak manusia pertama kali menempati bumi. Lahan berfungsi sebagai tempat manusia beraktivitas untuk mempertahankan eksistensi. Aktivitas yang pertama kali dilakukan adalah pemanfaatan lahan untuk bercocok tanam. Penguasaan dan penggunaan lahan mulai beralihfungsi seiring pertumbuhan populasi dan perkembangan peradaban manusia. Hal ini akhirnya menimbulkan permasalahan kompleks akibat pertambahan jumlah penduduk, penemuan dan pemanfaatan teknologi, serta dinamika pembangunan. Lahan yang semula berfungsi sebagai media bercocok tanam, berangsur-angsur berubah menjadi multifungsi pemanfaatan.

Perubahan spesifik dari penggunaan untuk pertanian ke pemanfaatan bagi nonpertanian yang kemudian dikenal dengan istilah alih fungsi lahan. Fenomena ini tentunya dapat mendatangkan permasalahan yang serius. Implikasi alih fungsi lahan pertanian yang tidak terkendali dapat mengancam kapasitas penyediaan pangan, dan bahkan dalam jangka panjang dapat menimbulkan kerugian sosial (Iqbal dan Sumaryanto, 2007). Dampak alih fungsi lahan sawah ke penggunaan nonpertanian menyangkut dimensi yang sangat luas. Hal itu terkait dengan aspek-aspek perubahan orientasi ekonomi, sosial, budaya, dan politik masyarakat. Arah perubahan ini secara langsung atau tidak langsung akan berdampak terhadap pergeseran kondisi ekonomi,

tata ruang pertanian, serta prioritas-prioritas pembangunan pertanian wilayah dan nasional (Winoto, 1995; Nasoetion dan Winoto, 1996).

Perubahan penggunaan lahan dapat terjadi karena adanya perubahan rencana tata ruang wilayah, adanya kebijaksanaan arah pembangunan dan karena mekanisme pasar. Dua hal terakhir terjadi lebih sering pada masa lampau karena kurangnya pengertian masyarakat maupun aparat pemerintah mengenai tata ruang wilayah. Alih fungsi dari pertanian ke nonpertanian terjadi secara meluas sejalan dengan kebijaksanaan pembangunan yang menekankan kepada aspek pertumbuhan melalui kemudahan fasilitas investasi, baik kepada investor lokal maupun luar negeri dalam penyediaan tanah (Widjanarko, dkk, 2006).

Pertumbuhan penduduk yang cepat diikuti dengan kebutuhan perumahan menjadikan lahan-lahan pertanian berkurang di berbagai daerah. Lahan yang semakin sempit semakin terfragmentasi akibat kebutuhan perumahan dan lahan industri. Petani lebih memilih bekerja di sektor informal dari pada bertahan di sektor pertanian. Daya tarik sektor pertanian yang terus menurun juga menjadikan petani cenderung melepas kepemilikan lahannya. Pelepasan kepemilikan lahan cenderung diikuti dengan alih fungsi lahan (Gunanto, 2007). Pertumbuhan perekonomian menuntut pembangunan infrastruktur baik berupa jalan, bangunan industri dan pemukiman. Kondisi demikian mencerminkan adanya peningkatan permintaan terhadap lahan untuk penggunaan nonpertanian yang mengakibatkan banyak lahan sawah, terutama di sekitar perkotaan, mengalami alih fungsi. Alih fungsi lahan juga

dapat terjadi oleh karena kurangnya insentif pada usahatani lahan sawah yang diduga akan menyebabkan terjadi alih fungsi lahan ke tanaman pertanian lainnya.

Permasalahan tersebut diperkirakan akan mengancam kesinambungan produksi beras nasional. Isu alih fungsi lahan sawah perlu mendapat perhatian karena beras merupakan bahan pangan utama. Ketergantungan pada impor beras akan semakin meningkat apabila isu alih fungsi lahan sawah diabaikan. Pasar beras internasional bersifat *thin market*, artinya ketergantungan terhadap impor sifatnya tidak stabil dan akan menimbulkan kerawanan pangan yang pada gilirannya akan mengancam kestabilan nasional (Ilham, dkk, 2003). Pemilik lahan mengalihfungsikan lahan pertaniannya untuk kepentingan nonpertanian oleh karena mengharapkan keuntungan lebih. Secara ekonomis, lahan pertanian, terutama sawah, harga jualnya tinggi karena biasanya berada di lokasi yang berkembang. Namun, bagi petani penggarap dan buruh tani, alih fungsi lahan menjadi bencana karena mereka tidak bisa beralih pekerjaan. Para petani semakin terjebak dengan semakin sempitnya kesempatan kerja sehingga akan menimbulkan masalah sosial yang pelik.

Masalah alih fungsi lahan dapat diatasi bila pemerintah daerah sangat ketat dalam hal penataan ruang. Pemerintah harus tegas dalam melarang pembangunan perumahan dan industri yang hendak menggunakan lahan di kawasan pertanian. Alih fungsi lahan dapat dicegah dengan menjadikan sektor pertanian sebagai lapangan usaha yang menarik dan bergengsi secara alami. Alih fungsi lahan yang terjadi tanpa kendali dapat menimbulkan persoalan ketahanan pangan, lingkungan dan ketenagakerjaan (Syahyuti, 2007).

1.2 Rumusan Masalah

Bertitik tolak dari semua uraian di atas, maka perumusan masalah yang akan dianalisis adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh alih fungsi lahan pertanian dari tanaman pangan/padi menjadi tanaman kelapa sawit terhadap kecukupan pangan di Pasaman Barat
2. Bagaimana pengaruh alih fungsi lahan pertanian dari tanaman pangan/padi menjadi tanaman jagung terhadap kecukupan pangan di Pasaman Barat
3. Apa sajakah kebijakan yang perlu dilakukan oleh pemerintah untuk menahan laju penurunan produksi padi/tanaman pangan akibat alih fungsi lahan di Pasaman Barat

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah maka tujuan yang akan dicapai dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pengaruh alih fungsi lahan pertanian dari tanaman pangan/padi menjadi tanaman kelapa sawit terhadap kecukupan pangan di Pasaman Barat
2. Untuk mengetahui pengaruh alih fungsi lahan pertanian dari tanaman pangan/padi menjadi tanaman jagung terhadap kecukupan pangan di Pasaman Barat

3. Untuk merumuskan implikasi kebijakan yang perlu dilakukan oleh pemerintah untuk menahan laju penurunan produksi padi/tanaman pangan akibat alih fungsi lahan di Pasaman Barat

1.4 Manfaat Penelitian

Setiap penelitian diharapkan dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membacanya maupun yang secara langsung terkait didalamnya. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Manfaat praktis

Berguna sebagai salah satu informasi dan untuk mengetahui pengaruh alih fungsi lahan pertanian dari tanaman pangan/padi menjadi tanaman sawit dan jagung terhadap ketahanan pangan di Pasaman Barat

2. Manfaat teoritis

Bagi peneliti diharapkan dapat menambah pengetahuan serta dapat digunakan sebagai landasan atau pangkal tolak bagi penelitian di bidang yang sama di masa yang akan datang.

1.5 Hipotesis

Hipotesis adalah penjelasan sementara yang harus diuji kebenarannya mengenai masalah yang sedang dipelajari. Hipotesis merupakan sarana penelitian

yang penting dan tidak dapat ditinggalkan karena merupakan instrumen kerja dari teori. Satuan hipotesis selalu dirumuskan dalam bentuk kalimat pertanyaan yang menghubungkan antara dua variabel atau lebih. Hipotesis yang dimaksud adalah suatu proporsi, kondisi atau prinsip yang untuk sementara waktu dianggap benar dan mungkin tanpa keyakinan agar bisa ditarik suatu konsekuensi yang logis, dengan cara ini kemudian diadakan pengujian tentang kebenaran dengan menggunakan data empiris dari hasil penelitian. Berdasarkan tujuan di atas, maka dapat ditarik hipotesis sebagai berikut :

- 1) Perubahan produksi kelapa sawit akibat alih fungsi lahan pertanian berpengaruh signifikan dan berhubungan negatif terhadap produksi padi di Kabupaten Pasaman Barat.
- 2) Perubahan produksi jagung akibat alih fungsi lahan pertanian berpengaruh signifikan dan berhubungan negatif terhadap produksi padi di Kabupaten Pasaman Barat.

1.6 Sistematika Penulisan

Penulisan penelitian ini terdiri dari lima bagian. Adapun sistematikanya adalah sebagai berikut:

BAB I PENGANTAR

Bab ini mencakup uraian mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah dan hipotesis. Selain itu bagian ini juga menjelaskan tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA.

Bab ini menjelaskan gambaran umum mengenai teori-teori yang mendukung penelitian, pembahasan mengenai penelitian-penelitian yang berkaitan dengan masalah penelitian.

BAB III METODELOGI PENELITIAN

Bab ini berisi uraian mengenai cara dan langkah- langkah yang dilakukan dalam penelitian.

BAB IV GAMBARAN UMUM

Bab ini menjelaskan perkembangan daerah penelitian baik dari sektor ekonomi, sektor pertanian, perkembangan lahan, serta keadaan geografi, penduduk dan Produk Domestik Bruto (PDRB).

BAB V HASIL PENELITIAN DAN IMPLIKASI KEBIJAKAN

Bab ini menjelaskan analisis hasil, intepetasi data, pembahasan dari penelitian serta implikasi kebijakan.

BAB VI PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian secara keseluruhan, dan saran berdasar hasil penelitian terhadap perekonomian Indonesia dalam kaitannya dengan tujuan penelitian.

BAB II

TINJAUAN LITERATUR

2.1 Landasan Teoritis

2.1.1 Alih Fungsi Lahan

Lestari (2009) mendefinisikan alih fungsi lahan atau lazimnya disebut sebagai konversi lahan adalah perubahan fungsi sebagian atau seluruh kawasan lahan dari fungsinya semula (seperti yang direncanakan) menjadi fungsi lain yang menjadi dampak negatif (masalah) terhadap lingkungan dan potensi lahan itu sendiri. Alih fungsi lahan juga dapat diartikan sebagai perubahan untuk penggunaan lain disebabkan oleh faktor-faktor yang secara garis besar meliputi keperluan untuk memenuhi kebutuhan penduduk yang makin bertambah jumlahnya dan meningkatnya tuntutan akan mutu kehidupan yang lebih baik.

Konversi lahan adalah perubahan fungsi sebagian atau seluruh kawasan lahan dari fungsinya semula (seperti yang direncanakan) menjadi fungsi lain yang menjadi dampak negatif (masalah) terhadap lingkungan dan potensi lahan. Konversi lahan juga dapat diartikan sebagai perubahan untuk penggunaan lain disebabkan oleh faktor-faktor yang secara garis besar meliputi keperluan untuk memenuhi kebutuhan penduduk yang makin bertambah jumlahnya dan meningkatnya tuntutan akan mutu kehidupan yang lebih baik. Irawan (2005) mengemukakan bahwa konversi lahan lebih besar terjadi pada lahan sawah dibandingkan dengan lahan kering karena dipengaruhi oleh tiga faktor, *pertama*, pembangunan kegiatan non pertanian seperti

komplek perumahan (*real estate*), pertokoan, perkantoran, dan kawasan industri lebih mudah dilakukan pada tanah sawah yang lebih datar dibandingkan dengan lahan kering. *Kedua*, akibat pembangunan masa lalu yang terfokus pada upaya peningkatan produk padi maka infrastruktur ekonomi lebih tersedia di daerah persawahan daripada daerah tanah kering. *Ketiga*, daerah persawahan secara umum lebih mendekati daerah konsumen atau daerah perkotaan yang relatif padat penduduk dibandingkan daerah tanah kering yang sebagian besar terdapat di wilayah perbukitan dan pegunungan. Sebagai konsekuensi logis dari penambahan penduduk dan pembangunan ekonomi, maka terjadi perubahan alokasi sumberdaya, khususnya sumberdaya lahan sulit dihindari.

Akibat tidak diperhatikannya skala prioritas alokasi penggunaan sumberdaya lahan, maka terjadi pula konflik alokasi sumberdaya lahan untuk penyediaan sumber pangan dan pembangunan sarana dan prasarana pemukiman. Sumaryanto, dkk (2001) menyatakan bahwa terjadinya konversi lahan sawah sangat dipengaruhi oleh permintaan terhadap lahan menurut sektor perekonomian, yaitu penggunaan untuk non pertanian dan pertanian. Konversi lahan sawah ke penggunaan non pertanian menunjukkan jumlah yang lebih besar dibanding ke penggunaan pertanian lainnya, seperti untuk perumahan (*real estate*), zona industri, sarana dan prasarana serta penggunaan lainnya. Data luas konversi lahan sawah menurut periode, sampai saat ini diyakini belum ada yang akurat, dan bervariasi antara satu sumber data dan sumber lainnya.

Hal ini diungkapkan juga olehnya bahwa faktor utama yang menyebabkan terjadinya kondisi demikian adalah:

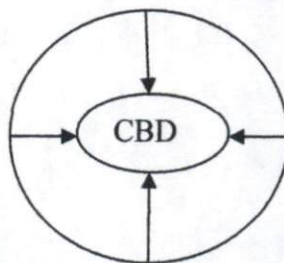
- (1) Belum adanya koordinasi antara instansi dalam pendataan masalah sawah,
- (2) Masing-masing instansi cenderung mengungkapkan data lahan yang sesuai dengan kepentingannya sendiri, misalnya Dinas Pengairan, PU cenderung menerbitkan data luas sawah irigasi teknis yang lebih besar dari fakta di lapangan agar anggaran pemeliharaan irigasi menjadi lebih besar lagi,
- (3) Setiap instansi menggunakan pendekatan dan metode yang berbeda dalam memonitor perkembangan luas lahan.

Konversi lahan sawah biasanya dilakukan secara langsung oleh petani pemilik lahan sawah ataupun tidak langsung oleh pihak lain. Sebelumnya diawali dengan transaksi jual beli lahan sawah. Proses konversi lahan sawah pada umumnya berlangsung cepat jika akar penyebabnya terkait dengan upaya pemenuhan kebutuhan sektor ekonomi lain yang menghasilkan surplus ekonomi (*land rent*) jauh lebih tinggi, seperti untuk pembangunan kawasan industri, kawasan perumahan (*real estate*), dan sebagainya. Untuk pemenuhan kebutuhan mendasar (prasarana umum yang diprogramkan pemerintah, atau untuk lahan tempat tinggal pemilik lahan yang bersangkutan). Proses konversi lahan sawah cenderung berlangsung lambat jika motivasi untuk mengubah fungsi terkait dengan degradasi fungsi lahan sawah, misalnya akibat kerusakan jaringan irigasi sehingga lahan tidak dapat difungsikan lagi sebagai lahan sawah (Gunanto, 2007).

2.1.2 Bid – Rent Theory

Teori Lokasi Von Thunen adalah pelopor dalam kelompok Teori Bid-rent yang mula-mula muncul pada abad ke-19 di Jerman. Struktur ruang pada waktu itu umumnya bersifat “monocentric”, dimana pada setiap wilayah merupakan daerah pertanian dalam arti luas. Petani bertempat tinggal secara tersebar di wilayah ini dan melakukan kegiatan pertanian untuk menghasilkan komoditi yang dapat dikonsumsi sendiri dan atau untuk dijual. Hasil produksi yang akan dijual dibawa ke pusat perdagangan yang merupakan kota kecil dimana si tuan tanah bertempat tinggal. Sedangkan perdagangan antar daerah pada waktu masih sangat terbatas, kalau tidak dapat dikatakan tidak ada sama sekali. Struktur ruang yang bersifat monocentric ini adalah seperti terlihat pada gambar 2.1. tentunya dalam kenyataannya struktur ruang monocentric tersebut dapat sedikit bervariasi dibandingkan dengan gambar 2.1, dan bahkan adakalanya bersifat “multicentric”.

Gambar 2.1 Struktur Ruang Monosentrik



Dalam menjabarkan teorinya Von Thunen membuat langkah-langkah secara sistematis yaitu:

1. Merupakan asumsi dan permasalahannya

2. Persoalan Von Thunen dengan harga konstan:
 - a. Satu jenis tanaman
 - b. Berbagai jenis tanaman
3. Persoalan Von Thunen dengan masalah yang dihadapi yaitu persoalan yang menyangkut dengan masalah harga tanaman yang berubah-ubah:
 - a. Sejenis tanaman
 - b. Berbagai jenis tanaman
4. Merumuskan kembali model Von Thunen sebagai suatu programming model.
 - a. Kasus dengan harga tanaman yang konstan
 - b. Kasus dengan harga tanaman yang berubah-ubah

Berdasarkan struktur ruang yang sangat sederhana tersebut Von Thunen menyusun Teori Lokasi khusus untuk pemilihan dan analisa lokasi kegiatan pertanian. Pada teori ini, faktor utama yang menentukan pemilihan lokasi atau penggunaan tanah (*land-use*) adalah tinggi rendahnya sewa tanah (*land-rent*). Biasanya sewa tanah ini akan semakin tinggi bila mendekati pusat kota dan akan semakin rendah bila jauh dari pusat kota. Sedangkan pemilihan lokasi akan ditentukan oleh kemampuan membayar sewa tanah (*bid-rent*) yang dapat dihasilkan dari penggunaan tanah yang bersangkutan. Lebih jelasnya, *bid-rent* tersebut akan ditentukan oleh besarnya hasil produksi yang diperoleh serta biaya-biaya yang harus dikeluarkan baik untuk kegiatan produksi maupun ongkos angkut hasil produksi ke pasar.

a. Kasus 1 Jenis Tanaman

Untuk memudahkan penjelasan tentang ide dari Teori Lokasi Von Thunen, maka formulasinya dimulai dengan kasus yang paling sederhana yaitu untuk kasus 1 jenis tanaman saja. Analisa dimulai dari tujuan utama kegiatan pertanian yang dikelola secara swasta yaitu untuk mencari keuntungan yang maksimum. Sehubungan dengan hal ini, maka analisa akan dimulai dengan fungsi keuntungan yang dapat ditulis sebagai berikut:

$$\pi = pQ - aQ - QT(k) - R(k)$$

Atau
$$\pi = Q(p - a) - QT(k) - R(k)$$

Dimana Q adalah jumlah produksi komoditi pertanian yang dapat dihasilkan per unit sedangkan p dan a masing-masing adalah harga produk dan biaya produksi rata per unit. $T(k)$ dan $R(k)$ masing-masingnya adalah ongkos angkut dan sewa tanah (*land-rent*) yang keduanya dipengaruhi oleh jauh dekatnya jarak (k) ke pasar.

Dengan mengasumsikan bahwa pasar bersifat kompetitif, dalam jangka pendek, keuntungan akan cenderung positif karena pada saat itu belum banyak saingan yang menanam komoditi yang sama. Kondisi ini akan merangsang pengusaha lain untuk ikut menanam modal dalam usaha ini karena keuntungan yang cukup besar. Akibatnya, tingkat keuntungan akan cenderung menurun, sehingga dalam jangka panjang akan tercapai kondisi *equilibrium* dimana keuntungan menjadi nol. Dalam keadaan demikian, maka:

$$Q(p - a) - QT(k) - R(k) = 0$$

Sehingga:
$$R^*(k) = Q(p - a) - QT(k)$$

dimana $R^*(k)$ adalah *bid-rent* yang menunjukkan kemampuan untuk membayar sewa tanah dari hasil pemanfaatan tanah yang bersangkutan. Karena itu persamaan (2.2) dinamakan sebagai persamaan *bid-rent* yang merupakan variabel penting dalam Teori Lokasi Von Thunen.

Pemilihan lokasi yang optimal untuk usaha pertanian komoditi tertentu akan ditentukan oleh perbandingan *bid-rent* sewa tanah yang berlaku di pasaran. Berdasarkan prinsip ini, maka bila $R^*(k) > R(k)$, yaitu kemampuan membayar sewa tanah (*bid-rent*) lebih besar dari sewa tanah di pasaran (*land-rent*), maka lahan tersebut layak digunakan karena akan dapat memberikan keuntungan. Ini berarti juga bahwa lokasi optimal kegiatan pertanian tersebut adalah pada lahan yang bersangkutan. Sebaliknya, bila $R^*(k) < R(k)$, maka lahan tersebut tidak layak digunakan atau kosong, karena penggunaannya akan mengakibatkan kerugian.

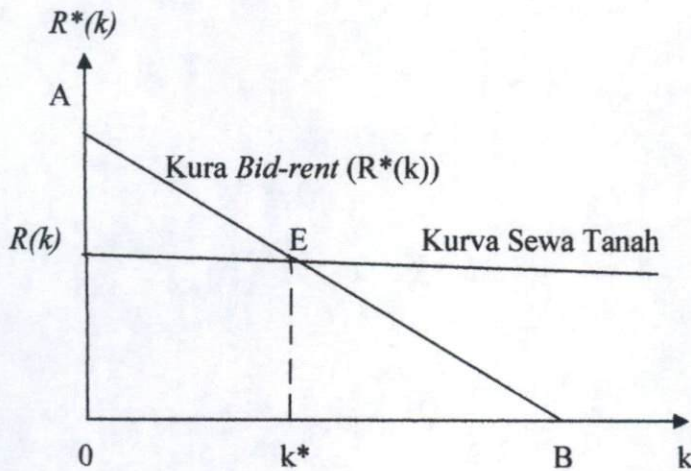
Logika sederhana ini dapat pula dipresentasikan dengan menggunakan grafik

2.2 Kurva AB yang mempunyai kemiringan negatif adalah Kurva *bid-rent*. Sedangkan garis horizontal merupakan Kurva Sewa Tanah yang dianggap tetap berdasarkan harga pasar. E adalah titik keseimbangan antara $R^*(k)$ dan $R(k)$. daerah sebelah kiri titik E adalah menunjukkan $R^*(k) > R(k)$ yang berarti daerah dari titik 0 sampai dengan titik k^* adalah layak ditanami. Sedangkan daerah sebelah kanan titik E adalah menunjukkan $R^*(k) < R(k)$ yang berarti kurang layak untuk ditanami dari sudut pandang ekonomi. Tentunya dalam hal ini diasumsikan bahwa tanah yang bersangkutan secara teknis layak ditanami sedangkan keputusan untuk pemanfaatannya ditentukan oleh pertimbangan ekonomi.

Gambar 2.2

Penentuan Lokasi Kegiatan Pertanian dan Kelayakan Penggunaan

Lahan



Dalam keadaan keseimbangan (*equilibrium*), *bid-rent* akan cenderung sama dengan *land-rent*, atau $R^*(k) = R(k)$. Alasannya adalah bila $R^*(k) > R(k)$, berarti keuntungan yang dapat diperoleh dalam penanaman suatu komoditi masih sangat besar, sehingga hal ini akan mendorong para pengusaha lainnya untuk juga ikut menanam komoditi yang bersangkutan. Bila hal ini terus terjadi, maka jumlah penawaran komoditi hasil produksi usaha tersebut akan semakin banyak di pasaran sehingga harga akan cenderung menurun. Keadaan ini selanjutnya akan menyebabkan tingkat keuntungan dan *bid-rent* juga akan turun sehingga dalam jangka panjang $R^*(k) = R(k)$. Sebaliknya akan terjadi bila $R^*(k) < R(k)$. Berdasarkan hal ini, Teori Lokasi *bid-rent* menyatakan bahwa sebidang lahan akan ditanami dengan suatu komoditi bila *bid-rent* sama dengan *land-rent*, atau $R^*(k) = R(k)$. Secara grafis, hal

ini berarti bahwa dalam keadaan keseimbangan (equilibrium) kurva *bid-rent* akan sama dengan kurva *land-rent*.

b. Kasus 2 Tanaman

Tentunya dalam kenyataan sebidan tanah (lahan) dapat ditanami oleh berbagai jenis tanaman yang membutuhkan jenis dan kesuburan tanah yang sama. Karena itu, Teori Lokasi Bid-rent yang lebih lengkap memasukkan pula kasus lebih dari satu jenis tanaman. Untuk memudahkan analisa, marilah kita ambil kasus 2 jenis tanaman dapat ditanam pada sebidang lahan. Dengan demikian persamaan bid-rent pada persamaan 2 menjadi:

$$R_i^*(k) = Q_i(p_i - a_i) - Q_i T(k), \quad i = 1, 2$$

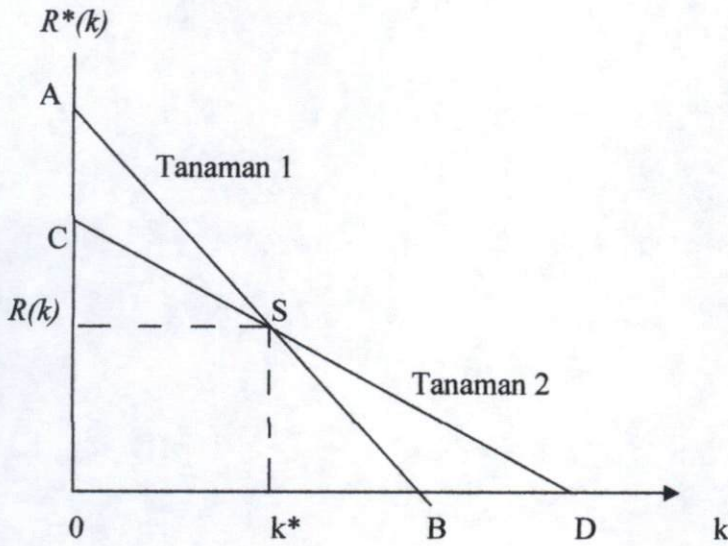
Tentunya, dalam hal ini akan terdapat dua persamaan *bid-rent*. Dengan demikian dalam keadaan keseimbangan, Von Thunen bahwa sebidang tanah akan ditanami dengan komoditi yang *bid-rent*nya tertinggi. Dengan demikian : bila $R_1^*(k) > R_2^*(k)$, lahan tersebut layak ditanami dengan tanaman 1, $R_1^*(k) < R_2^*(k)$, lahan tersebut layak ditanami dengan tanaman 2.

Keadaan ini akan menjadi lebih jelas bila dilihat gambar 2.3. kurva $R_1^*(k)$ menunjukkan kurva *bid-rent* tanaman 1 sedangkan $R_2^*(k)$ adalah kurva *bid-rent* untuk tanaman 2. Titik potong S menunjukkan kondisi dimana *bid-rent* dari kedua tanaman tersebut sama. Karena itu lahan dimulai dari titik 0 sampai dengan titik k^* layak ditanami dengan tanaman 1 karena tanaman ini mempunyai *bid-rent* yang lebih besar. Sedangkan lahan yang dimulai dari titik k^* sampai dengan titik D akan layak ditanami dengan tanaman 2 karena *bid-rent*nya sudah sama dengan nol sehingga

tidak akan memberikan keuntungan apapun bagi pengusaha. Grafik 2.3 mempresentasikan penentuan lokasi kegiatan pertanian untuk kasus 2 jenis tanaman.

Gambar 2.3

Penentuan Lokasi Kegiatan Pertanian Untuk 2 Jenis Tanaman



2.1.3 Fungsi Produksi

Fungsi produksi adalah suatu persamaan yang menggambarkan jumlah *output* maksimum yang dapat dihasilkan dari suatu set faktor-faktor produksi tertentu dan dengan tingkat teknologi tertentu pula. Secara teoretis dianggap bahwa setiap petani/produsen mempunyai fungsi produksi sesuai dengan kegiatan produksi yang dilakukan. Fungsi produksi yang dimaksud dirumuskan sebagai berikut.

$$Q = f(T, M, L, S)$$

Keterangan: Q = jumlah produksi fisik total,

T = luas tanah,

M = jumlah modal.

L = jumlah tenaga kerja,

S = *skill*.

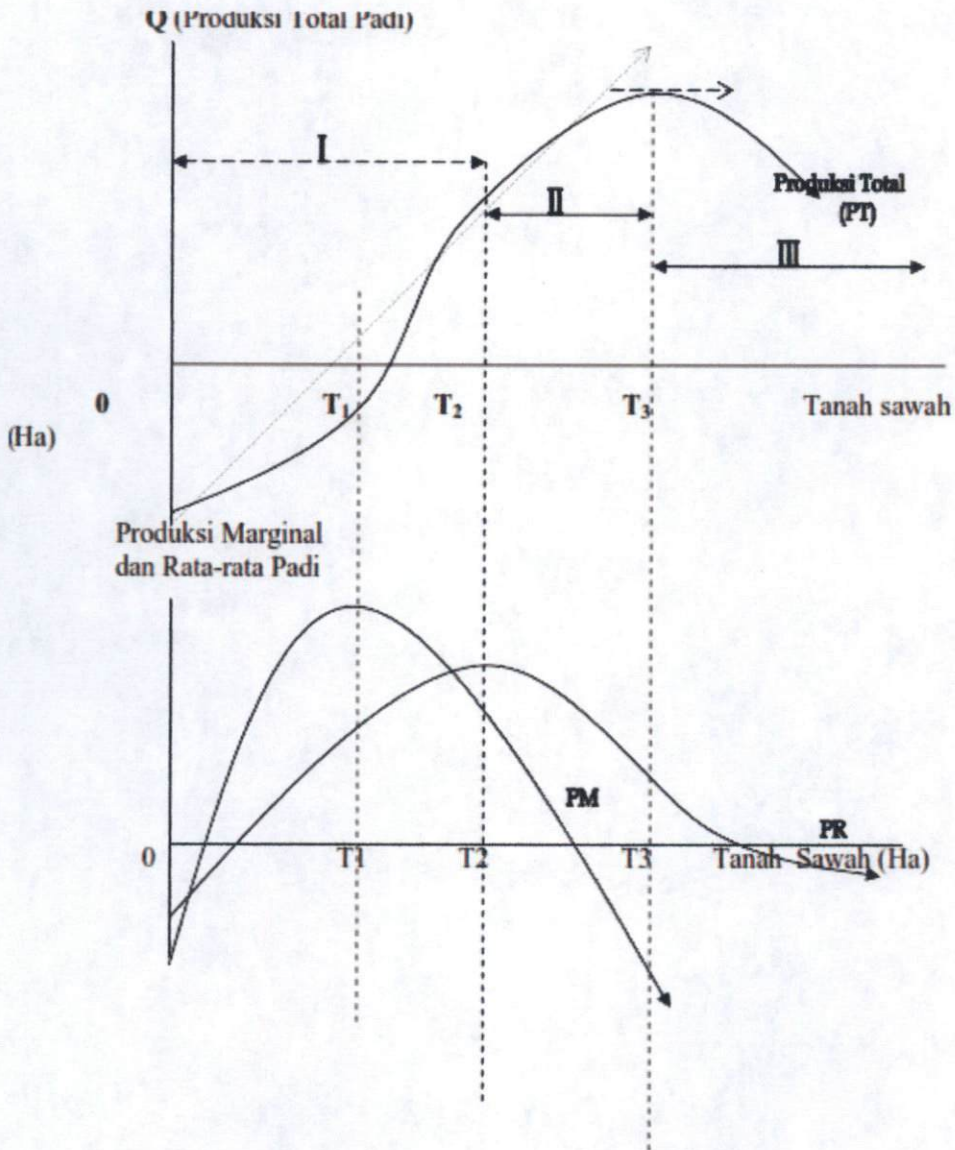
Lebih lanjut perbedaan di dalam penggunaan faktor-faktor produksi dan macam usaha tani dapat menyebabkan petani memiliki fungsi produksi yang berbeda-beda. Bila fungsi produksi tersebut di atas kemudian disederhanakan, yaitu dengan mengasumsikan bahwa hanya tanah yang mempengaruhi *output* dan faktor selain anah dijaga konstan. Penyederhanaan yang demikian menyebabkan fungsi produksi dirumuskan:

$$Q = f(T).$$

Fungsi produksi yang dimiliki dalam setiap kegiatan usaha tani dapat diestimasi berdasarkan data yang dimiliki. Selanjutnya fungsi produksi ini dapat digambar dalam bentuk Gambar (Mubyarto, 1979).

Gambar 2.4

Produksi Total, Produksi Marginal, dan Produksi Rata-Rata Produksi Padi



Keterangan: PT = produksi total,
PM = produksi marginal,
dan PR = produksi rata-rata

(1) I dan II = tahapan produksi yang kurang efisien secara teknis

(2) III = tahapan produksi yang efisien secara teknis

Pada Gambar 2.4 diperlihatkan tahapan kegiatan produksi mulai dari titik 0 ke kanan pada sumbu datar. Bagi setiap kegiatan produksi, hukum alam yakni kenaikan hasil yang makin berkurang (*law of diminishing return*) bagaimanapun akan berlaku. Peningkatan penggunaan tanah antara 0-T1 kenaikan hasil mula-mula bertambah dengan makin bertambahnya penggunaan tanah. Pada jarak ini kurva PT, PM, dan PR mengalami kenaikan dengan pesat. Kemudian pada penggunaan tanah antara T1-T2 terlihat bahwa kurva PT, PR kenaikannya tidak terlalu drastis, sedangkan kurva PM setelah mencapai tingkat maksimum selanjutnya menurun.

Pada penambahan penggunaan tanah antara T2-T3 tampak bahwa kurva PT tetap meningkat, tetapi dengan penambahan yang semakin mengecil dan dapat mencapai tingkat maksimum, sedangkan kurva PM terus menurun dan dapat mencapai nol. Sebaliknya, pada saat itu kurva PR masih mengalami peningkatan, bahkan dapat mencapai tingkat maksimum dan kemudian kurva PR pun kembali menurun. Tahapan terakhir ini dikatakan sebagai tahapan produksi yang efisien secara teknis, yakni jika kegiatan berproduksi tersebut berada di sekitar penggunaan tanah antara T2-T3. Jika kegiatan produksi melebihi penggunaan tanah T3, maka tampak kurva PT justru menurun, demikian pula kurva PM menurun dan mencapai nol pada saat kurva PT mencapai tingkat maksimum. Pada saat yang sama kurva PR terus mengalami penurunan dan penurunan kurva PR ini tidak pernah sampai memotong sumbu datar.

2.1.4 Teori Produksi Pertanian

Produksi adalah jumlah hasil. Dalam usaha tani guna memperoleh hasil produksi, petani melakukan usaha pengkombinasian faktor-faktor produksi yang dimiliki, seperti luas tanah, modal seperti pupuk, obat-obatan, bibit, dan lain-lain, tenaga kerja, keahlian. Produktivitas adalah kemampuan suatu faktor produksi, seperti luas tanah untuk memperoleh hasil produksi per hektare. Produksi dan produktivitas ditentukan oleh banyak faktor, seperti kesuburan tanah, varietas bibit yang ditanam, penggunaan pupuk yang memadai, baik jenis maupun dosis, tersedianya air dalam jumlah yang cukup, teknik bercocok tanam yang tepat, penggunaan alat-alat produksi pertanian yang memadai, dan tersedianya tenaga kerja (Ace Partadiredja, 1980).

Dalam kondisi nyata luas dan kesuburan tanah yang dimiliki petani adalah berbeda-beda, demikian pula keadaan lingkungan kehidupan sosial ekonomi mereka. Dengan perbedaan yang ada maka usaha tani dapat dikelompokkan menjadi sebagai berikut.

- a. Usaha tani yang bersifat subsisten, yakni dengan ciri-ciri sebagai berikut.
 - (1) Produksi subsisten (*subsistence production*) dengan tingkat komersial yang rendah dan produksi digunakan untuk memenuhi kebutuhan keluarga sendiri.
 - (2) Tingkat kehidupan subsisten (*subsistence living*), yakni yang berhubungan dengan kemampuan memenuhi tingkat kebutuhan hidup yang minimum.

b. Usaha tani yang bersifat seperti sebuah perusahaan (*farm bussines*) dengan ciri-ciri sebagai berikut:

- (1) Pengalokasian biaya disesuaikan dengan kegiatan usaha yang dilakukan.
- (2) Pencapaian tingkat efisiensi teknis (penggunaan tenaga kerja dan modal) agar diperoleh kuantitas produksi yang optimum dan pencapaian tingkat efisiensi ekonomis, yakni laba yang maksimum (Warton. Jr dan Clifton, 1969).

Walaupun ada perbedaan seperti yang diuraikan di atas, di balik itu ada pula kesamaan di antara petani ini, yakni mereka memandang pertanian sebagai suatu sarana pokok untuk memenuhi kebutuhan keluarga, yaitu melalui hasil-hasil produksi pertanian (Mosher, A.T.1996).

2.2 Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Alih Fungsi Lahan

Sesuai dengan dinamika pembangunan, baik di berbagai negara di dunia maupun di negara kita penyebab perubahan penggunaan lahan dapat diidentifikasi secara rinci *von Thunen* (dalam Nugroho *et al*, 2004) memberikan gambaran tentang perubahan tataguna lahan dapat terjadi karena faktor-faktor berikut ini.

a. Pertumbuhan Ekonomi.

Pertumbuhan ekonomi dapat dijelaskan sebagai kenaikan nilai tambah perusahaan (industri). Pertumbuhan ekonomi memiliki pengaruh besar dan cepat terhadap perubahan alih fungsi lahan, karena faktor lain seperti inersia dan per luasan lahan industri untuk membentuk suatu zona transisi memerlukan waktu lama. Padahal

tingkat permintaan lahan di luar zona transisi makin meningkat sebagai akibat kecenderungan tumbuhnya sub-perkotaan.

b. Biaya Transportasi

Pengaruh penurunan biaya transport sangat dirasakan oleh industri yang berlokasi jauh dari pusat bisnis (*Central Bisnis Distrik*), sehingga kenaikan *land rent* relatif tinggi dan dapat mendorong relokasi serta tumbuhnya sub-perkotaan.

c. Perubahan Teknologi

Terjadinya perubahan teknologi menuju lebih hemat, praktis dan canggih secara umum mempengaruhi pengurangan peranan *central bisnis distrik* (CBD), dan sebaliknya mendatangkan keuntungan bagi wilayah yang jauh dari CBD. Akibatnya permintaan lahan di luar pusat kota meningkat, sehingga meningkatkan *land rent* dan menurunkan kepadatan di CBD.

d. Perubahan Citra dan Nilai

Permintaan lahan di luar CBD meningkat bukan karena kesan negative tentang pusat kota seperti kekumuhan dan kriminalitas, sedangkan di luar CBD tersimpan nilai-nilai sosial, yaitu kualitas lingkungan yang baik dan sumber tenaga kerja yang relatif lebih banyak dan murah.

e. Faktor Pendapatan

Kenaikan pendapatan mempengaruhi individu dalam meningkatkan pengeluaran untuk perumahan dan merealisasikan keluarga tunggal. Keadaan ini dengan sendirinya dapat meningkatkan permintaan lahan di luar pusat kota dan mengakibatkan turunnya kepadatan penduduk.

Banyaknya faktor yang mempengaruhi konversi lahan sesuai tuntutan dinamika pembangunan seperti yang diuraikan di atas, menunjukkan bahwa pembangunan selayaknya tidak hanya mengejar pertumbuhan ekonomi belaka namun perlu mempertimbangkan dampak yang diakibatkannya secara komprehensif. Dengan pola pembangunan yang serasi dan selaras dengan lingkungan alam sekitarnya, tentu saja akan meningkatkan potensi yang ada dan meminimalkan dampak negatifnya.

2.3 Dampak Alih Fungsi Lahan Pertanian

Alih fungsi lahan pertanian (sawah) ke penggunaan nonpertanian dapat berdampak terhadap turunnya produksi pertanian, serta akan berdampak pada dimensi yang lebih luas dimana berkaitan dengan aspek-aspek perubahan orientasi ekonomi, sosial, budaya, dan politik masyarakat. Dalam penelitian Rahmanto, dkk (2002) alih fungsi lahan sawah juga menyebabkan hilangnya kesempatan petani memperoleh pendapatan dari usahataniannya. Menurut Sudirja (2008) alih fungsi lahan pertanian bukan hanya sekedar memberi dampak negatif seperti mengurangi produksi beras, akan tetapi dapat pula membawa dampak positif terhadap ketersediaan lapangan kerja baru bagi sejumlah petani terutama buruh tani yang terkena oleh alih fungsi tersebut serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Menurut Irawan dan Friyatno (2005) proses alih fungsi lahan pertanian pada tingkat mikro dapat dilakukan oleh petani sendiri atau dilakukan pihak lain. Alih fungsi lahan yang dilakukan oleh pihak lain secara umum memiliki dampak yang lebih besar terhadap penurunan kapasitas produksi pangan karena proses alih fungsi

lahan tersebut biasanya mencakup hamparan lahan yang cukup luas, terutama ditujukan untuk pembangunan kawasan perumahan. Alih fungsi lahan yang dilakukan oleh pihak lain tersebut biasanya berlangsung melalui pelepasan hak pemilikan lahan petani kepada pihak lain yang kemudian diikuti dengan, pemanfaatan lahan tersebut untuk kegiatan non pertanian. Dampak alih fungsi lahan pertanian terhadap masalah pengadaan pangan pada dasarnya terjadi pada tahap kedua. Namun tahap kedua tersebut secara umum tidak akan terjadi tanpa melalui tahap pertama karena sebagian besar lahan pertanian dimiliki oleh petani. Oleh karena itu pengendalian pemanfaatan lahan untuk kepentingan pengadaan pangan pada dasarnya dapat ditempuh melalui dua pendekatan yaitu:

1. Mengendalikan pelepasan hak pemilikan lahan petani kepada pihak lain, dan
2. Mengendalikan dampak alih fungsi lahan tanaman pangan tersebut terhadap keseimbangan pengadaan pangan.

Konversi lahan sawah mempunyai dampak positif dan negatif. Konversi lahan sawah menjadi lahan perumahan (*real estate*) dan industri, misalnya merupakan masalah nasional yang memberikan berbagai dampak, terutama terhadap ketahanan pangan, berkurangnya kesempatan kerja di bidang pertanian (tenaga kerja yang berlatar belakang pertanian mempunyai kesempatan kecil memasuki lapangan kerja di bidang industri), dan terhadap lingkungan. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Widjanarko, dkk (2006) terkonsentrasinya pembangunan perumahan (*real estate*) dan industri di Pulau Jawa, di satu sisi menambah terbukanya lapangan kerja di sektor

nonpertanian seperti jasa konstruksi, dan industri, akan tetapi juga menimbulkan dampak negatif yang kurang menguntungkan. Dampak negatif tersebut antara lain :

1. Berkurangnya luas sawah yang mengakibatkan turunnya produksi padi, yang mengganggu tercapainya swasembada pangan serta mengakibatkan bergesernya lapangan kerja dari sektor pertanian ke nonpertanian. Apabila tenaga kerja tidak terserap seluruhnya akan meningkatkan angka pengangguran.
2. Investasi pemerintah dalam pengadaan sarana dan prasarana pengairan menjadi tidak optimal pemanfaatannya.
3. Kegagalan investor dalam melaksanakan pembangunan perumahan maupun industri, sebagai dampak krisis ekonomi, atau karena kesalahan perhitungan mengakibatkan tidak termanfaatkannya tanah yang telah diperoleh, sehingga meningkatkan luas lahan tidur yang pada gilirannya juga menimbulkan konflik sosial seperti penjarahan lahan.

2.4 Konsep Ketahanan Pangan

Ketahanan pangan sebagai terjemahan dari food security telah dibahas secara mendalam pada pertemuan-pertemuan internasional sejak terjadinya krisis pangan yang melanda dunia pada awal tahun 1970-an. Pada waktu itu pengertian ketahanan pangan lebih difokuskan pada masalah penyediaan pangan dalam kuantitas yang sesuai dengan kebutuhan pangan di suatu Negara. Swasembada pangan merupakan indicator utama yang digunakan untuk mencerminkan kondisi ketahanan pangan di

suatu Negara. Oleh karena itulah pada tahun 1970-an seluruh Negara berusaha untuk mencapai swasembada pangan dan pada tahun 1984 Indonesia memperoleh penghargaan dalam siding FAO di Roma karena dinilai berhasil membangun ketahanan pangannya akibat tercapainya swasembada beras (Irawan et al., 1999).

Setelah krisis pangan berlalu, pengertian tentang ketahanan pangan terus mengalami perkembangan sesuai dengan permasalahan dan tantangan yang dihadapi. Kondisis swasembada pangan mulai diragukan sebagai satu-satunya indicator ketahanan pangan suatu Negara. Hal ini dikarenakan pengalaman di Negara-negara yang dianggap telah mencapai swasembada pangan seperti Korea Selatan (1976), Filipina (1977), dan Indonesia (1984), menunjukkan bahwa kondisis swasembada pangan tidak selalu menjamin pemenuhan kebutuhan pangan bagi seluruh penduduk di Negara yang bersangkutan, terutama bagi kelompok penduduk miskin. Disamping itu, kekurangan pangan yang diindikasikan dari mengalirnya impor pangan, seringkali masih terjadi khususnya apabila terjadi gangguan produksi pangan akibat berbagai factor seperti iklim yang buruk, bencana alam, peningkatan serangan hama dan penyakit, konversi lahan pertanian, dan sebagainya.

Dengan demikian, disadari bahwa kondisi ketahanan pangan tidak cukup hanya diukur dari kondisi swasembada pangan di tingkat Negara karena hal tersebut belum menjamin terjadinya kecukupan pangan sepanjang waktu bagi seluruh lapisan masyarakat. Sejak itu konsep ketahanan pangan terus berkembang dan disempurnakan sesuai dengan permasalahan pangan yang dihadapi di berbagai Negara. Pengertian ketahanan pangan yang mencakup aspek lebih luas dan bersifat

universal dicetuskan dalam siding komisi Ketahanan Pangan FAO pada tahun 1991 yang mendefinisikan bahwa: “ketahanan pangan adalah suatu kondisi ketersediaan pangan yang cukup bagi setiap orang pada setiap saat, dan setiap individu memiliki akses untuk memperolehnya baik secara fisik maupun secara ekonomik” (Soetrisno, 1998). Berdasarkan definisi tersebut, maka permasalahan substantive ketahanan pangan tidak hanya mencakup aspek kuantitas ketersediaan pangan secara memadai, tetapi menyangkut pula aspek stabilitas ketersediaan pangan menurut waktu dan aspek aksesibilitas penduduk terhadap bahan pangan yang dibutuhkan.

Berbagai hasil konferensi internasional tentang gizi yang disponsori oleh FAO dan WHO di Roma pada tahun 1992, aspek gizi mulai dimasukkan kedalam konsepsi ketahanan pangan (Soetrisno,1998). Aspek gizi yang dimaksud meliputi tiga hal yaitu: kecukupan jumlah, mutu dan keragaman pangan, serta keamanan pangan bagi kehidupan yang sehat. Keragaman pangan dikaitkan dengan masalah kecukupan gizi makanan, karena setiap jenis pangan umumnya memiliki keunggulan dalam zat gizi tertentu tetapi memiliki keterbatasan dalam kandungan zat gizi lainnya. Dengan pola konsumsi pangan yang beragam, maka zat gizi makanan yang dikonsumsi penduduk akan semakin beragam pula, sesuai dengan kebutuhan fisiologi manusia.

Perkembangan pemikiran tentang ketahanan pangan di Indonesia tidak terlepas dari perkembangan yang terjadi di tingkat dunia. Sampai dengan akhir Pelita V masalah ketahanan pangan masih diukur dari aspek kuantitas ketersediaan pangan secara nasional yang diukur dari kondisi swasembada pangan. Konsepsi ketahanan pangan dengan cakupan aspek yang lebih luas baru dicetuskan pada Pelita VII

melalui Undang-Undang Pangan Nomor 7 Tahun 1996 dimana ketahanan pangan didefinisikan sebagai: “kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya aman, merata dan terjangkau”. Makna terjangkau dalam pengertian ini adalah bahwa setiap individu memiliki kemampuan untuk mendapatkan bahan pangan baik secara fisik maupun secara ekonomik (aksesibilitas ekonomik). Sedangkan ketersediaan pangan di pasar atau di tingkat rumah tangga, yang dapat diperoleh dari hasil produksi sendiri atau membeli di pasar.

Berdasarkan definisi tersebut di atas maka ruang lingkup ketahanan pangan dapat dilihat dari tiga dimensi yaitu:

- 1) Dimensi ruang lingkup ketahanan pangan yaitu lingkup nasional, daerah dan rumah tangga yang terkait dengan aspek kuantitas ketersediaan pangan
- 2) Dimensi waktu dan musim yang terkait dengan aspek stabilitas ketersediaan pangan sepanjang waktu, dan
- 3) Dimensi social ekonomi rumah tangga yang terkait dengan akses aksesibilitas rumah tangga terhadap bahan pangan, aspek kualitas konsumsi pangan, dan aspek keamanan pangan.

Soetrisno (1998) berpendapat bahwa ketahanan pangan di tingkat nasional atau daerah dapat diartikan sebagai agregasi ketahanan pangan pada tingkat rumah tangga. Namun pendapat tersebut tidak sejalan dengan Simatupang (1999), yang mengemukakan bahwa lingkup ketahanan pangan mulai dari tingkat nasional hingga tingkat individu pada dasarnya merupakan suatu hirarki dengan aspek ketahanan

pangan yang tidak selalu sama untuk setiap tingkatan hirarki. Ketahanan pangan di tingkat nasional, regional atau local tidak selalu menjamin ketahanan pangan di tingkat rumah tangga akibat ketimpangan distribusi pendapatan rumah tangga. Dalam kaitan ini masalah kelancaran distribusi pangan juga memiliki peranan penting agar bahan pangan yang tersedia dapat diakses oleh seluruh kelompok rumah tangga miskin.

2.5 Penelitian Terdahulu

Fanny Anugerah K (2005) dalam penelitiannya yang berjudul " Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Konversi Lahan Sawah Ke Penggunaan Non Pertanian Di Kabupaten Tangerang" mengatakan bahwa Dampak kerugian akibat konversi lahan sawah yang terjadi di Kabupaten Tangerang diantaranya yaitu rata-rata kehilangan produksi padi per hektar lahan sawah yang terkonversi selama sepuluh tahun (1994-2003) adalah sebesar 35.881,05 ton atau sekitar 3.588,11 ton per tahun Secara tidak langsung terjadinya alih fungsi lahan sawah juga memberikan manfaat yaitu peningkatan penerimaan daerah yang diperoleh dari peningkatan pajak. Peningkatan status lahan sawah menjadi lahan kering untuk perumahan atau industri berarti peningkatan nilai pajak yang diterima pemerintah daerah. Semakin besar nilai kumulatif pajak bumi dan bangunan maka semakin besar pula kontribusi terhadap penerimaan pemerintah daerah tersebut.

Neneng Solihah (2002) dalam penelitiannya yang berjudul " Dampak Alih Fungsi Lahan Sawah Ke Penggunaan Non Sawah Terhadap Pendapatan Petani Di

Kabupaten Bogor” menyatakan bahwa alih fungsi lahan sawah menurunkan pendapatan petani. Persentase pendapatan usaha tani pada sawah terhadap total pendapatan berpengaruh positif terhadap pendapatan petani dan peubah dummy petani menunjukkan jika seorang petani melakukan alih fungsi lahan sawah maka pendapatannya akan menurun. Besarnya peranan pertumbuhan kawasan terhadap peluang alih fungsi lahan sawah harus diimbangi dengan usaha mengurangi pengangguran tersembunyi di sektor pertanian. Disamping itu pemerintah daerah perlu meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan peraturan pertanahan yang sudah ada.

Alamsyah (2010) dalam penelitiannya yang berjudul “ Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pengambilan Keputusan Atas Konversi Lahan Pertanian Menjadi Pemukiman Di Kota Medan” menyatakan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi pemilik lahan mengkonversi lahan atau menjual lahan pertaniannya adalah harga lahan, proporsi pendapatan, luas lahan, produktivitas lahan, status lahan dan kebijakan pemerintah.

Lily Fauzia (2004) dalam penelitiannya yang berjudul “Pengaruh Alih Fungsi Lahan Pertanian Terhadap Sosial Ekonomi Masyarakat (Studi Kasus Di Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang) menyatakan bahwa alih fungsi lahan pertanian berpengaruh terhadap pendapatan masyarakat sejalan dengan munculnya berbagai aktivitas ekonomi yang membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat. Dari hasil uji chi-square terdapat hubungan yang sangat nyata antara alih fungsi lahan dengan pendapatan pada $\alpha = 1 \%$.

Perumahan Daulay (2003) dalam penelitiannya yang berjudul “ Konversi Lahan Komoditi Karet Menjadi Komoditi Kelapa Sawit” menyatakan bahwa

- 1) perkembangan konversi dari lahan karet menjadi kelapa sawit di Desa Batu Tunggal diketahui yaitu 66 % dari luas lahan karet konversi menjadi lahan kelapa sawit
- 2) Analisis usaha tani yang bersumber dari data sekunder/penelitian menunjukkan bahwa usaha tani kelapa sawit lebih menguntungkan dibandingkan usaha tani karet.
- 3) Faktor-faktor yang memotivasi petani mengkonversi lahan karet ke kelapa sawit adalah 70 % didominasi oleh faktor coba-coba mengikuti orang lain, selebihnya disebabkan faktor lain.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan di dalam penelitian ini adalah jenis data sekunder yang berbentuk perbandingan antara dua periode waktu yaitu antara tahun 2008 dengan 2009. Sumber data tersebut diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) Padang. Dalam penelitian ini digunakan data kuantitatif, yakni data yang dapat diukur dengan angka. Data yang dimaksud terdiri atas perubahan produksi tanaman pangan, perubahan produksi kelapa sawit, dan perubahan produksi jagung.

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan penelitian ini adalah :

1. Riset Kepustakaan (*Library Research*)

Pengumpulan data dan informasi yang berkaitan dengan penulisan penelitian ini melalui literatur atau referensi kepustakaan.

2. Riset Lapangan (*Field Research*)

Pengumpulan data dan informasi secara langsung diperoleh melalui instansi dan lembaga yang berhubungan dengan penelitian ini.

3.2 Pembentukan Model

Untuk memperlihatkan pengaruh alih fungsi lahan pertanian dari tanaman pangan/padi menjadi tanaman sawit dan jagung terhadap produksi padi di Kabupaten

Pasaman Barat, dilakukan analisis atau pengujian empiris dengan menggunakan Model Regresi Linier Sederhana yaitu:

$$Y = f(X_1, X_2) \dots \dots \dots (1)$$

Dimana:

Y adalah variabel terikat (dependent variable)

X₁, X₂ adalah variabel bebas (independent variabel) atau variabel penjelas (exsplanatory variable)

3.3 Definisi Operasional

Adapun defenisi operasional variabel yang digunakan adalah sebagai berikut:

- 1) Perubahan produksi kelapa sawit adalah perubahan jumlah produksi kelapa sawit yang mampu dihasilkan pada periode waktu antara tahun 2008-2009(yang diukur dalam ton).
- 2) Perubahan produksi jagung adalah perubahan jumlah produksi kelapa sawit yang mampu dihasilkan pada periode waktu antara tahun 2008-2009(yang diukur dalam ton).
- 3) Perubahan produksi tanaman pangan adalah perubahan jumlah produksi yang mampu dihasilkan periode waktu antara tahun 2008-2009di sektor pertanian tanaman pangan, yakni padi yang diukur dengan ton.

3.4 Metode Pengolahan dan Analisis Data

Analisa yang digunakan dalam penelitian ini adalah model analisis Regresi Linear Berganda. Analisa ini digunakan untuk membahas hubungan antara dua variabel atau lebih variabel indenpenden. Variabel dependen (terikat) dalam penelitian ini adalah jumlah produksi tanaman pangan di Kabupaten Pasaman Barat (Y) dan variabel independen (bebas) yaitu luas lahan pertanian (X_1). Secara fungsional digambarkan sebagai berikut:

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + U \dots \dots \dots (2)$$

Dimana:

- Y = Produksi total tanaman pangan
- $\beta_0, \beta_1, \beta_2$ = Konstanta
- X_1 = perubahan produksi kelapa sawit
- X_2 = perubahan produksi jagung
- U = Kesalahan pengganggu
- $\beta_0 \dots \beta_2$ = Konstanta

3.5 Uji Statistik

Pengujian hipotesis ini disebut juga dengan pengujian signifikansi yang bertujuan untuk melihat pengaruh variabel independen dengan variabel dependen, dengan cara melakukan analisis regresi linier berganda kuadrat terkecil (*Ordinary Least Square/OLS*). Pengujian hipotesis ini dilakukan dengan menggunakan tahap-tahap sebagai berikut :

a. Pengujian t (t-test)

Uji t dilakukan dengan menggunakan t-test, apabila t hitung yang didapat besar dari T-tabel maka, $H_0 : \beta = 0$ ditolak dan koefisien β signifikan.

Rumusnya adalah sebagai berikut:

$$t = \frac{b_i}{S_{b_i}} \dots\dots\dots(3)$$

Dimana :

t adalah t hitung

b_i adalah koefisien regresi yang diuji

S adalah simpangan baku b_i

b. Pengujian R^2

Untuk mengetahui seberapa jauh hubungan antara variabel, perlu dihitung koefisien determinasi (R^2) dengan rumus:

$$R^2 = \frac{ESS}{TSS} \dots\dots\dots(4)$$

Dimana:

ESS adalah Explained Sum of Square

TSS adalah Total Sum of Square

Semakin besar nilai R^2 semakin tepat model ini dipakai sebagai alat pengujian hipotesis.

c. Pengujian F

Uji F adalah uji hipotesis yang membuktikan tingkat keberartian seluruh variabel bebas terhadap satu variabel terikat, dengan rumus:

$$F \text{ hitung} = \frac{ESS}{k-1} \dots\dots\dots(5)$$

Dimana:

k adalah banyaknya variabel

BAB IV

GAMBARAN UMUM

4.1 Perkembangan Ekonomi Kabupaten Pasaman Barat

Kabupaten Pasaman Barat adalah salah satu dari 19 Kabupaten di Provinsi Sumatra Barat dan mempunyai luas wilayah 4.248,40 km² itu. Sejalan dengan pelaksanaan otonomi daerah, dengan dilandasi oleh Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Propinsi Sumatera Barat, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan, maka perencanaan pembangunan daerah di Pasaman Barat pada hakekatnya adalah pengembangan wilayah berbasis komoditi perkebunan yang saling terkait antara berbagai aspek antara lain agro industri, penyediaan sarana dan penataan infrastruktur, pengembangan kelembagaan, jaringan pemasaran serta dukungan pembiayaan.

Setelah empat tahun mandiri sebagai kabupaten sendiri berpisah dari Kabupaten Pasaman, Pasaman Barat pun mulai mengedepankan potensi ekonominya. Berbagai sektor menjanjikan prospek cerah, tinggal investor yang datang untuk menggarapnya. Wilayah Pasaman Barat sangat bervariasi. Mulai dari dataran tinggi hingga pesisir pantai. Daerah ini juga memiliki perkebunan sawit yang luas.

Pembukaan perkebunan sawit ini pula yang membuat Pasaman Barat berkembang. Di tahun 80-an, Pasaman Barat masih dikenal sebagai daerah tertinggal, sejak kehadiran investor daerah ini berkembang menjadi daerah dengan pendapatan tertinggi di Sumbar. Namun sayangnya perkembangan ini tidak dinikmati seluruh masyarakat. Persentase masyarakat miskin dan putus sekolah masih tinggi.

Kabupaten ini termasuk dalam daerah yang berkembang cepat dalam penerimaan PDRB Propinsi Sumatera Barat. Dari perhitungan kontribusi PDRB, sub sektor yang paling banyak berperan dalam pembangunan ekonomi Kabupaten Pasaman Barat adalah sub sektor pertanian. Berkembangnya komoditas perkebunan secara otomatis akan mempengaruhi tingkat pendapatan masyarakat suatu daerah dan juga Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Sumbangan PDRB dari tanaman perkebunan dapat diandalkan dan secara realita pembangunan perkebunan mempunyai dampak yang jelas terhadap peningkatan pendapatan petani dan pertumbuhan ekonomi masyarakat Pasaman Barat.

Pembangunan perkebunan yang diusahakan oleh masyarakat Kabupaten Pasaman Barat baik berupa perkebunan rakyat maupun perkebunan besar, telah menghasilkan pengalaman yang sangat berharga dan memberikan suatu pemahaman bahwa usaha perkebunan sangat berkaitan langsung dengan aspek ekonomi, sosial dan ekologi. Dalam aspek ekonomi, usaha perkebunan telah memberi peranan yang penting antara lain dalam penerimaan devisa negara, sumber ekonomi daerah berupa Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta sumber pendapatan masyarakat. Dalam aspek sosial, usaha perkebunan telah mampu menyerap tenaga kerja cukup besar, baik

sebagai petani pemilik maupun sebagai tenaga kerja. Sedangkan dalam aspek ekologi, dengan sifat tanaman yang berupa pohon, usaha perkebunan mendukung kelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup, seperti kelestarian sumber daya air, penyediaan oksigen sebagai sumber kehidupan manusia dan mengurangi degradasi lahan.

Pembangunan perkebunan yang dikembangkan dilandasi oleh Undang-undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang pembentukan Kabupaten Darmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat dan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang perkebunan, yang intinya menggariskan pembangunan usaha perkebunan adalah :

1. Mempercepat pemulihan ekonomi dan mewujudkan landasan pembangunan yang lebih kokoh bagi pembangunan ekonomi berkelanjutan.
2. Wujud perekonomian yang akan dibangun harus lebih adil dan merata, mencerminkan peran daerah dan pemberdayaan seluruh rakyat, berdaya saing dengan basis efisiensi dan menjamin pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup.
3. Dalam konteks pembangunan daerah maka membangun sektor perkebunan diharapkan dapat mempercepat pembangunan ekonomi yang efektif dan kuat, dengan pemberdayaan pelaku dan potensi daerah, sehingga terjadi pemerataan pertumbuhan ekonomi sejalan dengan pelaksanaan otonomi daerah.

Perkembangan ekonomi suatu daerah dipengaruhi oleh berbagai faktor, diantaranya potensi sumber daya yang dimiliki, fasilitas penunjang berupa teknologi dan modal, serta faktor geografis daerah. Kabupaten Pasaman Barat merupakan salah satu daerah yang sangat potensial untuk pengembangan sektor pertanian dalam arti luas sebab daerah ini memiliki tanah yang subur, oleh karena itu Pemerintah Daerah lebih menitikberatkan pembangunan pada sektor pertanian dengan ditunjang oeh teknologi tepat guna. Meskipun demikian, pembangunan pada sektor-sektor lainnya tetap menjadi perhatian Pemerintah Daerah guna dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta pemanfaatan potensi daerah yang sebesar-besarnya.

Kabupaten Pasaman Barat memiliki potensi yang besar dalam pengembangan perkebunan karena didukung oleh letak geografis, keadaan iklim dan areal yang luas dan subur. Pada tahun 2010, jenis tanaman perkebunan unggulan di Kabupaten Pasaman Barat adalah Kelapa Sawit dengan luas 150.784,59 Ha dengan produksi TBS mencapai 3.148.929,02 ton. Kemudian diikuti oleh kakao seluas 11.094 Ha dengan produksi 7.296,82 ton, karet seluas 7.616 Ha dengan produksi 5.272.2 Ton dan nilam seluas 1.951 Ha dengan produksi 136,38 Ton (BPS Kota Padang).

Tantangan dalam pengembangan komoditi perkebunan antara lain belum berkembangnya Industri hilir di dalam negeri, produk perkebunan diekspor dalam bentuk primer sehingga proses nilai tambah tidak terjadi di dalam negeri. Berbagai kelembagaan petani yang ada belum mandiri dan berfungsi secara optimal, sehingga belum mampu memanfaatkan peluang usaha yang ada. Belum diterapkannya SNI dan sistem jaminan mutu secara optimal. Peluang pengembangan kakao yang bisa

dilakukan adalah antara lain peningkatan usaha intensifikasi, rehabilitasi, peremajaan dan peningkatan usaha pengolahan dan pemasaran hasil. Pengembangan komoditi perkebunan melalui perluasan areal di Kabupaten Pasaman Barat kurang mendapat dukungan dari sub sistem pengadaan sarana produksi dan pengembangan industri hilirnya, akibatnya kebun yang berhasil dibangun produksinya relatif masih rendah dan produksinya dipasarkan dalam bentuk produk primer. Kondisi ini membuka peluang bagi investor untuk berperan dalam upaya peningkatan potensi kebun dan pengembangan industri hilir.

Komoditas perkebunan merupakan komoditas yang utama untuk di ekspor ke luar negeri, dan merupakan sumber devisa utama yaitu lebih kurang 65 % dari total ekspor Pasaman Barat. Perkembangan ekspor tanaman komoditas perkebunan setiap tahunnya mengalami peningkatan, apalagi pada saat krisis ekonomi komoditas perkebunan dapat menjadi penyelamat dari defisiensi penerimaan keuangan negara. Volume nilai ekspor produk perkebunan asal Pasaman Barat cukup tinggi.

4.1.1 Perkembangan Sektor Pertanian

Alihfungsi atau konversi lahan pertanian menjadi lahan perkebunan sawit dan jagung yang marak dilakukan di Kabupaten Pasaman Barat (Pasbar) diprediksikan akan menurunkan produksi padi di Kabupaten petro dollar ini. Alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan perkebunan terutama lahan sawit dan jagung dalam skala besar berpotensi pada penurunan produksi padi di Kabupaten Pasaman Barat. Hal itu

dikarenakan perkebunan sawit dan jagung dinilai lebih menguntungkan daripada produksi padi.

Tabel 4.1

Produksi Padi tahun 2000-2009 di Kabupaten Pasaman Barat

Tahun	Luas Tanam (Ha)	Produksi (Ton)
2000	27.083	103.663
2001	22.487	84.906
2002	22.176	116.883
2003	22.266	100.237
2004	29.967	119.172
2005	16.127	77.606
2006	17.529	76.734
2007	14.840	56.487
2008	19.863	100.544
2009	21.511	106.620

Sumber: dinas tanaman pangan dan peternakan Kab. Pasaman Barat

Berdasarkan Tabel diatas dapat kita lihat bahwa produksi padi di Kab. Pasaman Barat mengalami fluktuasi atau naik turun. Hal ini dapat terlihat dari produksi padi yang paling tinggi adalah pada tahun 2004 yaitu sebesar 119.172 ton, sedangkan yang paling sedikit memproduksi padi adalah pada tahun 2006 yaitu sebesar 76.734 ton.

4.1.2 Perkembangan Lahan

Pasaman Barat merupakan kabupaten hasil pemekaran dari Kabupaten Pasaman sejak tahun 2005. Sebelum tahun 1990-an, daerah ini dulunya termasuk salah satu kawasan yang dikenal sebagai sentra produksi pangan, khususnya padi sawah dan kedelai di Sumatera Barat. Sejalan dengan perkembangan zaman, perubahan lahan pertanian terjadi di Kabupaten Pasaman Barat. Penurunan luas areal persawahan sejalan dengan makin meluasnya areal pertanaman kelapa sawit dan jagung didaerah ini. Pada tahun 2005, luas sawah Kabupaten Pasaman Barat tercatat 16.127 ha dengan luas panen 17.597 ha dan Indeks pertanaman 1,09. Kondisi ini memberikan pengertian bahwa sebagian besar lahan diusahakan kurang dari 2 kali tanam setahun. Tingkat produktifitas lahan sawah daerah ini cukup baik dengan rata-rata produksi 4,4 ton/tahun, namun sebagian petani menggunakan lahan sawahnya untuk budidaya jagung pada musim kemarau. Petani menganggap usahatani jagung lebih menguntungkan dibandingkan padi sawah.

Dalam priode tahun 2005-2007 terjadi penurunan luas areal persawahan secara kumulatif sebesar 1.287 ha. Pada kurun waktu bersamaan telah terjadi penambahan luas areal persawahan di Kecamatan Sungai Aur, Lembah Melintang, Sungai Beremas, dan Ranah Batahan masing-masing seluas 59, 645, 47, dan 706 ha. Total penambahan luas lahan sawah pada 4 kecamatan ini sebesar 1.457 ha.

Tabel 4.2
Luas lahan sawah dan pemanfaatannya untuk tanaman jagung di Pasaman Barat Tahun 2007.

	Kecamatan	Lahan sawah (ha)	Luas areal jagung (ha)	Areal jagung per lahan (ha)	
				Non sawah	Sawah
1.	Talamau	2.379	260	260	-
2.	Pasaman	2.825	7.708	4.954	2.754
3.	Luhak Nan Duo	861	4.710	3.806	904
4.	Sasak Ranah Pasisie	435	951	951	-
5.	Kinali	1.191	13.832	12.581	1.251
6.	Gunung Tuleh	726	413	413	-
7.	Sungai Aur	1.238	357	357	-
8.	Koto Balingka	286	280	236	44
9.	Lembah Melintang	2.379	369	369	-
10.	Sungai Beremas	401	223	223	-
11.	Ranah Batahan	2.119	182	182	-
	Jumlah	14.840	29.285	24.332	4.953

Keterangan: Indeks pertanaman jagung pada sawah rata-rata 150%

Sumber data: Dinas Pertanian Ketahanan Pangan dan Peternakan Pasaman Barat(2007) dan diolah dari hasil pengamatan lapangan.

Bila diperhitungkan penurunan luas lahan sawah secara keseluruhan maka penambahan lahan baku sawah dalam priode tahun 2005-2007 ini diikuti dengan pengalihan fungsi lahan secara riil seluas 2.744 ha dan penyusutan lahan ini menyebar di Kecamatan Talamau, Pasaman, Luhak Nan Duo, Kinali, Gunung Tuleh, dan Koto Balingka dengan luas masing-masing sebesar 540 ha, 392 ha, 861 ha, 403 ha, 414 ha, dan 143 ha. Penurunan yang terluas terjadi di Kecamatan Luhak Nan Duo yang saat ini telah berubah menjadi sentra utama perkebunan kelapa sawit rakyat dan jagung. Luas lahan sawah yang digunakan untuk areal pertanaman jagung di Kabupaten Pasaman Barat mencapai 4.953 ha atau setara dengan 33,2% dari luas

areal sawah. Membaiknya harga jagung yang mencapai Rp. 2.400,- per kilogram akan lebih menguntungkan dibandingkan usahatani padi sawah.

Tabel 4.3

Perubahan Luas areal sawah dalam periode tahun 2005-2007 di Pasaman Barat

No.	Kecamatan	Luas 2005 (ha)	Luas 2007 (ha)	Penyusutan (ha/%)
1.	Talamau	2.919	2.379	540 (18,5%)
2.	Pasaman	3.217	2.825	392(12,2%)
3.	Luhak Nan duo	1.722	861	861 (50%)
4.	Sasak Ranah Pasisie	426	435	1 (-)
5.	Kinali	1.594	1.191	403 (25,3%)
6.	Gunung Tuleh	1.140	726	414 (36,3%)
7.	Sungai Aur	1.179	1.238	+ 59
8.	Lembah Melintang	1.734	2.379	+645
9.	Koto Balingka	429	286	143 (33,3%)
10.	Sungai Beremas	354	401	+47
11.	Ranah Batahan	1.413	2.119	+706
	Jumlah	16.127	14.840	

Sumber data: Dinas Pertanian Ketahanan Pangan dan Peternakan Pasaman Barat.

4.2 Keadaan Geografi

Kabupaten Pasaman Barat merupakan salah satu dari 16 Kabupaten/Kota yang ada di propinsi Sumatera Barat. Kabupaten Pasaman Barat mempunyai wilayah 3.887,77 km² terdiri dari 11 kecamatan dan 19 nagari. Kabupaten Pasaman Barat dilintasi garis khatulistiwa yaitu pada 0⁰03' Lintang Utara sampai dengan 0⁰11' Lintang Selatan dan 99⁰10' Bujur Timur sampai dengan 100⁰04' Bujur Timur. Ketinggian Kabupaten Pasaman Barat antara 0 meter sampai dengan 2.912 meter di atas permukaan laut. Gunung tertinggi di Kabupaten Pasaman Barat yaitu Gunung Talamau dengan ketinggian 2.913 meter di atas permukaan laut.

Wilayah Kabupaten Pasaman Barat merupakan Kabupaten paling Barat dari Propinsi Sumatera Barat dan berbatasan dengan:

Bagian Utara	: Kabupaten Mandailing Natal Propinsi Sumatera Utara
Bagian Timur	: Kabupaten Pasaman
Bagian Selatan	: Kabupaten Agam
Bagian Barat	: Samudera Indonesia

Luas kecamatan di Kabupaten Pasaman Barat yang terbesar adalah Kecamatan Koto Balingka 486,51 km² (12,51 %). Luas Kecamatan terkecil berada di Kecamatan Sasak Ranah Pasisie 123, 31 Km² (3,17%).

4.3 Keadaan Penduduk

Penduduk Kabupaten Pasaman Barat menurut hasil proyeksi Penduduk tahun 2004 berjumlah sebanyak 320.559 jiwa dengan komposisi 161.567 jiwa laki-laki dan 158.992 jiwa perempuan. Dengan rasio jenis kelamin 102 jiwa laki-laki setiap 100 jiwa perempuan. Penduduk tersebut tersebar pada 11 kecamatan di Kabupaten Pasaman Barat.

Jika kita melihat distribusi penduduk per kecamatan, jumlah penduduk terbesar berdomisili di Kecamatan Pasaman yakni 51.654 jiwa. Diikuti oleh Kecamatan Kinali dengan jumlah penduduk 51.393 jiwa dan Kecamatan Lembah Melintang 37.510 jiwa. Sedangkan kecamatan Sasak Ranah Pasisie dengan jumlah penduduk 12.497 jiwa merupakan kecamatan terkecil jumlah penduduknya di Kabupaten Pasaman Barat. Namun jika dibandingkan dengan luas wilayah, penduduk terpadat berada di Kecamatan Lembah Melintang dengan kepadatan penduduk 177 jiwa/Km². Diikuti oleh Kecamatan Pasaman dengan 133 jiwa/Km².

Pada tahun 2004 jumlah rumah tangga di Kabupaten Pasaman Barat sebanyak 72.283 rumahtangga. Jika dibandingkan dengan jumlah penduduk didapat rata-rata penduduk per rumahtangga pada tahun 2004 di Kabupaten Pasaman sebanyak 4 jiwa/rumahtangga.

Tabel 4.4

Jumlah penduduk per Kecamatan Tahun 2004

Kecamatan	Jumlah Penduduk
Sungai Beremas	19.758
Ranah Batahan	21.003
Koto Balingka	22.662
Lembah Melintang	37.510
Sungai Aua	27.627
Gunung Tuleh	18.943
Pasaman	51.654
Sasak Ranah Pasisie	12.497
Luhak Nan Duo	32.699
Kinali	51.393
Talamau	24.783

Sumber: BPS Kota Padang

4.4 Produksi Domestik Bruto (PDRB)

Salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu wilayah dalam suatu periode tertentu ditunjukkan oleh data Produk Domestik Bruto (PDRB) baik atas harga berlaku maupun atas harga konstan. PDRB didefinisikan sebagai jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu wilayah tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi.

PDRB atas harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada setiap tahun. Sedangkan PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa tersebut yang dihitung menggunakan harga pada satu tahun tertentu sebagai dasar. PDRB atas harga berlaku dapat digunakan untuk melihat pergeseran dan struktur ekonomi, sedangkan atas harga konstan digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun.

Selain itu ada tiga pengertian Produk Domestik Bruto yang perlu dari segi yang berlainan:

a. Dari Segi Produksi

Produk Domestik Bruto adalah merupakan jumlah nilai tambah produk barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh unit-unit produksi di dalam suatu daerah (propinsi) dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun). Nilai tambah produk tersebut dihasilkan oleh sektor-sektor perekonomian yang produktif, yaitu:

1. Pertanian, kehutanan dan perikanan
2. Pertambangan
3. Industri pengolahan
4. Perusahaan listrik, air dan gas
5. Industri bangunan
6. Pengangkutan dan pergudangan
7. Perdagangan

8. Bank dan badan keuangan

9. Pemilikan tanah

10. Administrasi rumah

11. Jasa-jasa lainnya

b. Dari Segi Pendapatan

Produk Domestik Bruto adalah jumlah balas jasa yang diterima oleh factor-faktor produksi yang ikut serta dalam proses produksi di suatu daerah dalam jangka waktu (biasanya satu tahun).

c. Dari Segi Pengeluaran

Produk Domestik Bruto adalah jumlah pengeluaran yang dilakukan untuk konsumsi rumah tangga dan lembaga swasta yang tidak mencari untung, konsumsi pemerintah, pembentukan modal tetap, perubahan stock dan ekspor netto (barang keluar dikurangkan barang yang masuk suatu daerah/propinsi), di dalam suatu daerah/propinsi dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun).

Perhitungan Pendapatan Daerah Regional Kabupaten Pasaman Barat telah dilakukan dengan kombinasi metode produksi dan penerimaan. Metode ini didasarkan atas kelemahan-kelemahan yang terdapat dalam metode yang digunakan sebelumnya di beberapa daerah dan tersedianya data statistik untuk masing-masing sektor yang dilakukan perhitungannya. Ini berarti pendapatan regional di dasarkan

kepada perhitungan menurut lapangan usaha sebagaimana terdapat dalam pendapatan nasional.

Perhitungan PDRB mencerminkan antara lain sebagai berikut:

1. Mencerminkan produktivitas yang dapat dicapai secara menyeluruh, dengan memanfaatkan seluruh sumber yang tersedia, serta seluruh potensi dan pola ekonomi daerah.
2. Sampai seberapa jauh daerah telah dapat memberikan sumber penghidupan/penghasilan kepada berbagai golongan di dalam masyarakat maupun kepada pemerintah yaitu berupa: gaji, bunga, sewa tanah, keuntungan dan pajak-pajak.
3. Dapat memberikan gambaran tentang pertumbuhan ekonomi, struktur ekonomi, pendapatan sebagai hasil pembangunan serta dapat mengetahui adanya factor inflasi dan deflasi.
4. Dari penghasilan yang diterima oleh berbagai golongan dalam masyarakat tersebut akan dapat digunakan untuk membeli barang-barang dan jasa-jasa berupa barang modal dan barang-barang konsumsi. Dari konsumsi ini akan terlihat seberapa jauh tingkat penghidupan yang telah dicapai oleh golongan masyarakat tersebut. Pada table berikut ini dapat dilihat perkembangan PDRB Kabupaten Pasaman Barat menurut harga konstan pada tahun 2000, tahun 2004-2010.

Tabel 4.5
PDRB Kabupaten Pasaman Barat atas Harga Konstan 2000 tahun 2004-2009
(Jutaan Rupiah)

Tahun	Jumlah	Pertumbuhan (%)
2004	1.886.612,80	6,47
2005	1.988.702,87	6,54
2006	2.115.152,38	6,36
2007	2.250.818,83	6,41
2008	2.394.846,42	6,40
2009	2.554.855,11	6,26

Sumber : BPS Kota Padang

Dengan memperhatikan table diatas dapat kita ketahui bahwa kenaikan PDRB Kabupaten Pasaman Barat rata-rata selama periode 2004-2009 adalah 6,41%. Sedangkan kenaikan yang tertinggi terjadi pada tahun 2005 yakni sebesar 6,54%. Sedangkan kenaikan yang terendah terjadi pada tahun 2008 ke tahun 2009 yakni sebesar 6,26%. Terjadinya penurunan laju pertumbuhan PDRB tersebut adalah sebagai akibat turunnya laju pertumbuhan beberapa sektor ekonomi yang potensial.

Jika dilihat dari persentase PDRB Pasaman Barat terhadap PDRB Sumatera Barat memiliki peranan cukup besar terhadap pembentukan PDRB Sumatera Barat, dibandingkan dengan daerah lainnya, seperti yang terlihat pada table berikut ini:

Table 4.6**Perbandingan PDRB Kabupaten Pasaman Barat atas Harga Konstan 2000 dengan PDRB Sumatera Barat tahun 2004-2009 (Milyar Rp)**

Tahun	PDRB		Perbandingan PDRB (%)	
	PasBar	Sumbar	PasBar	Sumbar
2004	1.866,61	25.578,14	6,77	100
2005	1.988,70	25.159,48	6,82	100
2006	2.115,11	30.999,95	6,83	100
2007	2.250,82	32.912,97	6,84	100
2008	2.394,85	35.007,92	6,84	100
2009	2.554,86	36.464,58	6,98	100

Sumber : BPS Kota Padang

Pada tabel diatas terlihat bahwa PDRB Kabupaten Pasaman Barat dari tahun ketahun mengalami peningkatan, hal ini juga menggambarkan semakin meningkatnya perekonomian Kabupaten Pasaman Barat. Pada tahun 2004 PDRB Kabupaten Pasaman Barat nilainya adalah Rp.1.866,61 milyar sedangkan Sumbar adalah Rp. 25.578,14 milyar, jumlah ini terus meningkat menjadi sebesar Rp. 1.988,70 milyar untuk Kabupaten Pasaman Barat dan Rp. 25.159,48 milyar untu Sumbar. Jika kita lihat peranan atau kontribusi PDRB Kabupaten Pasaman Barat terhadap Sumbar juga meningkat dari tahun ketahun, yakni sebesar 6,77 % pada tahun 2004 dan menjadi 6,82 % pada tahun 2005.

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN IMPLIKASI KEBIJAKAN

5.1 Penemuan Empiris

Sebagaimana telah dikemukakan pada bab pendahuluan, bahwa dengan mengkaji perubahan produksi kelapa sawit dan perubahan produksi jagung yang merupakan penyebab terjadinya alih fungsi lahan atau konversi lahan pertanian khususnya lahan sawah sehingga berdampak negatif terhadap produksi tanaman pangan/padi di Kabupaten Pasaman Barat yang dilakukan dengan menggunakan metode Ordinary Least Square (OLS).

Dengan memperhatikan variabel-variabel yang ikut mempengaruhi alih fungsi lahan maka dipakai data sekunder yang diperoleh dari Biro Pusat Statistik kota Padang. Dalam penelitian ini akan dilihat seberapa jauh pengaruh alih fungsi lahan pertanian terhadap perubahan produksi kelapa sawit dan perubahan produksi jagung di Kabupaten Pasaman Barat.

Hasil perhitungan persamaan regresi dalam bentuk berganda (non linear) adalah sebagai berikut:

$$\Delta Q_t = 2174,3 - 2,556X_1 - 0,076X_2$$

$$(-2.524) \quad (-7.544)$$

$$R^2 = 0,878$$

F test = 28,654

Dari hasil penelitian yang dilakukan diperoleh koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,878. Angka ini menunjukkan 87,8% dari perubahan variabel dependent dapat diterangkan oleh variabel independent atau 88 % pengaruh produksi tanaman pangan/padi akibat alih fungsi lahan dapat diterangkan dari perubahan produksi tanaman kelapa sawit dan perubahan produksi tanaman jagung. Ini juga berarti bahwa pengaruh variabel-variabel independent tersebut signifikan terhadap perubahan produksi tanaman pangan/padi di Kabupaten Pasaman Barat. Dengan demikian perubahan variabel Q_t yang disebabkan oleh variabel lain yang dikesampingkan oleh model ini adalah sebesar 12%.

Persamaan diatas menunjukkan koefisien regresi (X_1) yaitu perubahan produksi kelapa sawit sebesar 2,556 ton/ha akibat pengaruh alih fungsi lahan. Ini berarti jika perubahan produksi kelapa sawit meningkat maka jumlah produksi tanaman pangan akan menurun sebesar 2,556 ton/ha di daerah kecamatan di Kabupaten Pasaman Barat. Dengan kata lain telah terjadi alih fungsi lahan pertanian tanaman pangan/padi menjadi tanaman kelapa sawit. Dari nilai t-hitung yang diperoleh $2,524 > t\text{-tabel } 2,262$, berarti hubungan antara perubahan produksi kelapa sawit dan produksi tanaman pangan dan alih fungsi lahan adalah signifikan. Berarti perubahan produksi kelapa sawit memperlihatkan pengaruh yang signifikan akibat alih fungsi lahan dan akan berdampak terhadap penurunan produksi tanaman pangan di Kabupaten Pasaman Barat.

Nilai koefisien (X_2) adalah koefisien regresi yaitu perubahan produksi jagung sebesar 0,076 ton/ha akibat alih fungsi lahan. Ini berarti bahwa jika terjadi kenaikan perubahan produksi jagung sebesar 0,076 ton/ha, maka produksi tanaman pangan/padi akan berkurang sebesar 0,076 ton/ha per tahun di daerah kecamatan di Kabupaten Pasaman Barat. Hasil estimasi ini didukung hasil uji t statistik yang signifikan pada tingkat signifikansi $\alpha = 5\%$. Ini berarti pula bahwa antara tahun 2008-2009 banyak terjadi alih fungsi lahan sawah ke nonsawah, sehingga terjadi penurunan produksi tanaman pangan di daerah kecamatan di Kabupaten Pasaman Barat.

Setelah analisis regresi, maka akan dilakukan pengujian hipotesis dengan uji F dimana hipotesis penelitian ini adalah:

H_0 = variabel independent yaitu luas lahan pertanian dan alih fungsi lahan pertanian secara bersama-sama tidak mempunyai pengaruh terhadap variabel dependent.

H_1 = variabel independent secara bersama-sama mempunyai pengaruh terhadap variabel dependent.

Pengujian secara keseluruhan dari variabel independent, yaitu pengaruh dari luas lahan pertanian dan alih fungsi lahan pertanian ternyata signifikan dengan derajat 99 %. Nilai ini diperoleh dengan pengoperasian data sebesar ($F=28,654$) lebih besar jika dibanding dengan F-tabel (4,46). Dari kedua variabel secara bersama-sama mempunyai pengaruh yang kuat terhadap total produksi tanaman pangan di Kabupaten Pasaman Barat, maka H_0 ditolak dan hipotesis H_1 dapat diterima karena terdapatnya hubungan antara variabel independent dengan variabel dependent.

5.2 Implikasi Kebijakan

Perlu digaris bawahi bahwa penyebab terjadinya alih fungsi lahan pertanian boleh dikatakan bersifat multidimensi. Oleh karena itu, upaya pengendaliannya tidak mungkin hanya dilakukan melalui satu pendekatan saja. Mengingat nilai keberadaan lahan pertanian bersifat multifungsi, maka keputusan untuk melakukan pengendaliannya harus memperhitungkan berbagai aspek yang melekat pada eksistensi lahan itu sendiri. Hal tersebut mengingat lahan yang ada mempunyai nilai yang berbeda, baik ditinjau dari segi jasa (*service*) yang dihasilkan maupun beragam fungsi yang melekat di dalamnya.

Sehubungan dengan isu di atas, Pearce and Turner (1990) merekomendasikan tiga pendekatan secara bersamaan dalam kasus pengendalian alih fungsi lahan sawah (*wetland*), yaitu melalui : (1) *regulation*; (2) *acquisition and management*; dan (3) *incentive and charge*. Uraian singkat dari ketiga pendekatan tersebut adalah sebagai berikut :

1. *Regulation*.

Melalui pendekatan ini pengambil kebijakan perlu menetapkan sejumlah aturan dalam pemanfaatan lahan yang ada. Berdasarkan berbagai pertimbangan teknis, ekonomis, dan sosial, pengambil kebijakan bisa melakukan pewilayahan (*zoning*) terhadap lahan yang ada serta kemungkinan bagi proses alih fungsi. Selain itu, perlu mekanisme perizinan yang jelas dan transparan dengan melibatkan semua pemangku kepentingan yang ada dalam proses alih fungsi lahan. Dalam tatanan praktisnya, pola ini telah diterapkan pemerintah melalui penetapan Rencana Tata

Ruang Wilayah dan pembentukan Tim Sembilan di tingkat kabupaten dalam proses alih fungsi lahan. Sayangnya, pelaksanaan di lapang belum sepenuhnya konsisten menerapkan aturan yang ada.

2. *Acquisition and Management.*

Melalui pendekatan ini pihak terkait perlu menyempurnakan sistem dan aturan jual beli lahan serta penyempurnaan pola penguasaan lahan (*land tenure system*) yang ada guna mendukung upaya ke arah mempertahankan keberadaan lahan pertanian.

3. *Incentive and Charges.*

Pemberian subsidi kepada para petani yang dapat meningkatkan kualitas lahan yang mereka miliki, serta penerapan pajak yang menarik bagi yang mempertahankan keberadaan lahan pertanian, merupakan bentuk pendekatan lain yang disarankan dalam upaya pencegahan alih fungsi lahan pertanian. Selain itu, pengembangan prasarana yang ada lebih diarahkan untuk mendukung pengembangan kegiatan budidaya pertanian berikut usaha ikutannya.

Mengingat selama ini penerapan perundang-undangan dan peraturan pengendalian alih fungsi lahan kurang berjalan efektif serta berpijak pada acuan pendekatan pengendalian sebagaimana dikemukakan di atas, maka perlu diwujudkan suatu kebijakan alternatif. Kebijakan alternatif tersebut diharapkan mampu memecahkan kebuntuan pengendalian alih fungsi lahan sebelumnya. Adapun komponennya antara lain instrumen hukum dan ekonomi, zonasi, dan inisiatif masyarakat. Instrumen hukum meliputi penerapan perundang-undangan dan

peraturan yang mengatur mekanisme alih fungsi lahan. Sementara itu, instrumen ekonomi mencakup insentif, disinsentif, dan kompensasi.

Kebijakan pemberian insentif diberikan kepada pihak-pihak yang mempertahankan lahan dari alih fungsi. Pola pemberian insentif ini antara lain dalam bentuk keringanan pajak bumi dan bangunan (PBB) serta kemudahan sarana produksi pertanian (Isa, 2006). Sebaliknya, disinsentif diberikan kepada pihak-pihak yang melakukan alih fungsi lahan yang implementasinya berlawanan dengan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku. Sementara itu, kompensasi ditujukan untuk pihak-pihak yang dirugikan akibat alih fungsi lahan untuk kegiatan pembangunan, atau yang mencegah terjadinya alih fungsi demi kelestarian lahan sebagai sumber produksi pertanian (pangan). Dengan kata lain, penerapan instrumen-instrumen tersebut berkaitan dengan pemberian penghargaan dan sanksi pelanggaran (*reward and punishment*).

Sebenarnya pengendalian konversi lahan pertanian, khususnya sawah ke penggunaan non pertanian dapat dilakukan melalui dua pendekatan, yaitu (a) pengendalian melalui kelembagaan dan pengaturan tentang pengalihan dan penatagunaan lahan sawah (*regulation*), (b) pengendalian melalui instrumen ekonomi, seperti melalui mekanisme kompensasi, kebijakan penerapan pajak progresif dan *bank tanah*. Mengenai pengendalian melalui instrumen ekonomi atau mekanisme kompensasi belum ada yang melakukan secara tuntas, walaupun ada baru sebatas pemikiran dan konsep-konsep.

Pendekatan ekonomi yang sudah dicoba dirintis oleh pemerintah adalah melalui penerapan *pajak progresif* pemilikan lahan. Namun pada tingkat pelaksanaan di lapangan masih terdapat kelebihan dan kekurangan dibanding dengan sistim penerapan peraturan. Sebagai ilustrasi Kantor Menteri Agraria/BPN (1999) memaparkan mengenai kelebihan dan kekurangan antara pengendalian pemilikan dan penguasaan tanah melalui penerapan peraturan dan kebijakan penerapan pajak progresif. Jadi kalau ditelaah lebih jauh, tampak bahwa pendekatan dalam pemecahan masalah pertanahan kedua-duanya ada kelemahan dan kelebihan. Secara gamblang dapat dikatakan bahwa pendekatan yang hanya menggunakan structural kelembagaan banyak menciptakan peluang “mengakali” peraturan tersebut. Sedangkan pendekatan ekonomi baik dengan kompensasi maupun pajak progresif, maka akan mengarah kepada kondisi kapitalis dimana secara perlahan-lahan sumberdaya alam (lahan) akan dikuasai dan dimiliki oleh orang-orang yang modalnya kuat.

Sedangkan mengenai kelembagaan dan pengaturan serta penata-gunaan lahan sudah banyak yang dikeluarkan oleh pemerintah baik pada tingkat pusat maupun daerah. Hal ini telah diungkap oleh Sumaryanto dkk (1995); Mariadi dan Suryanto (1997); Jamal dan Djauhari (1998), serta Jamal (1999). Dari beberapa ungkapan tersebut tampak bahwa peraturan pemerintah yang telah dikeluarkan ada beberapa kelemahannya diantaranya adalah :

a. Sistim perundang-undangan yang berkaitan dengan pengendalian konversi lahan sawah sebagian besar bersifat *implisit*, sehingga pada aplikasinya di lapangan

masih banyak celah-celah yang bisa diupayakan dikonversi tanpa melanggar peraturan tersebut.

b. Peraturan dan perundangan yang satu dengan lainnya bersifat *dualisme dan paradox*. Disatu sisi peraturan hendak melindungi pengalih-gunaan lahan sawah namun disisi lain pemerintah mendorong pertumbuhan industri yang pada kenyataannya terjadi pada sumberdaya yang baik (sawah).

c. Peraturan tersebut terputus antara peraturan yang satu dengan lainnya dalam sektor yang berbeda, sehingga tidak meliputi dan mendorong kerangka kerja yang *integratif dan koordinatif*.

d. Peraturan tersebut hanya bersifat *enforcement*, tetapi tidak diikuti oleh *control* dan penegakan supremasi hukum. Dengan demikian dijadikan celah-celah oleh aparat daerah untuk memperoleh keuntungan sesaat.

e. Peraturan yang ada cenderung hanya bersifat melarang pengalihan penggunaan lahan sawah, tanpa memberikan alternatif pemecahannya, sementara upaya pengembangan industri kadang kala terpaksa dilakukan di persawahan. Misalnya pada Surat Edaran Mentari Agraria/Kepala BPN No. 460-1594 tanggal 5 Juni 1996 secara implisit terkandung makna bahwa sawah yang sudah kering seolah-olah boleh dialih fungsikan menjadi non pertanian.

f. Kekuatan hukum peraturan yang dibuat, kadang-kadang tidak mendudukan status hukum sesuai dengan porsinya. Misalnya undang-undang di atur kembali oleh Kepres atau Kepmen, atau yang seharusnya diperdakan ternyata cukup dengan mengeluarkan SK. Dengan demikian memberikan celah-celah untuk melakukan

pelanggaran dengan tidak terjerat oleh hukum karena sulit untuk dibuktikan (*alibi*). Sebagai contoh Keppres No. 55/1993 tentang pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum. Padahal kalau dilihat UU Pokok Agraria No. 5/1996 pasal 18, seharusnya diatur oleh Undang-Undang.

Pemerintah pusat, telah mengeluarkan berbagai keputusan dan perundang-undangan dalam rangka pembatasan dan pengendalian konversi lahan pertanian ke non pertanian. Seperti yang telah diungkapkan oleh Sumaryanto dkk (1995); Mariadi dan Suryanto (1997); Jamal dan Djauhari (1998), serta Jamal (1999), bahwa bentuk perundang-undangan tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 5 tahun 1974 tentang ketentuan-ketentuan mengenai Penyediaan dan Pemberian tanah untuk keperluan persawahan.
- b. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 53 tahun 1989 tentang kawasan Industri.
- c. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 33 tahun 1990 tentang penggunaan lahan kawasan Industri.
- d. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 55 tahun 1993 tentang pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan bagi kepentingan umum.
- e. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 2 tahun 1993 tentang Tata Cara Memperoleh Izin lokasi dan Hal Atas Tanah bagi perusahaan dalam rangka penanaman modal.

- f. Surat Edaran Mentari Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor: 4102261 tanggal 22 Juli 1994 perihal pencagahan penggunaan tanah sawah ber-irigasi teknis untuk penggunaan non pertanian.
- g. Surat Edaran Mentari Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor: 4603364 tanggal 31 Oktober 1994 perihal pencagahan penggunaan tanah sawah ber-irigasi teknis untuk penggunaan non pertanian.
- h. Surat Edaran Mentari Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor: 4601594 tanggal 5 Juni 1996 perihal pencagahan penggunaan tanah sawah ber-irigasi teknis menjadi lahan kering.
- i. Surat Edaran Mentari Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor: 5417/MK/10/1994 tanggal 4 Oktober 1994 perihal efisien pemanfaatan lahan bagi pembangunan perumahan.
- j. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

Sedangkan peraturan daerah yang mengatur tentang pengendalian perubahan lahan sawah dituangkan dalam Rencana Umum Tata Ruang (RUTR) wilayah dan Rencana Umum Tata Ruang (RUTR) Daerah. Secara implisit tata ruang tersebut adalah mengendalikan perubahan fungsi lahan sawah menjadi non sawah, karena pada RUTR tersebut sudah jelas baik dari aspek hukum maupun tekniknya bahwa setiap wilayah (sawah) memiliki fungsi dan kegunaan yang secara wilayah sudah

ditetapkan peruntukannya. Berarti, apabila dalam pelaksanaannya terjadi penyimpangan, maka sebenarnya dapat dikatakan sudah melanggar hukum. Namun pada kenyataannya di lapangan, sering terjadi penyimpangan karena masih memungkinkan untuk diadakan revisi-revisi. Disamping itu lemahnya pengawasan dari implementasi peraturan tersebut, sehingga dapat dikatakan bahwa penerapan pengaturan alokasi lahan dengan RUTR tersebut belum sepenuhnya efektif.

Bertitik tolak pada hipotesis dan tujuan penelitian, maka selanjutnya dapat diuraikan implikasi dan kebijakan apa yang perlu diambil. Hasil analisa yang diperoleh dari koefisien-koefisien regresi diatas ternyata dapat memberikan gambaran atas total produksi tanaman pangan di Kabupaten Pasaman Barat. Digambarkan bahwa variabel-variabel independent yaitu luas lahan pertanian dan alih fungsi lahan memiliki nilai elastisitas yang signifikan terhadap variabel dependent yaitu produksi tanaman pangan.

Penurunan luas areal persawahan sejalan dengan makin meluasnya areal pertanaman kelapa sawit dan jagung didaerah ini. Pada tahun 2005, luas sawah Kabupaten Pasaman Barat tercatat 16.127 ha dengan luas panen 17.597 ha dan Indeks pertanaman 1,09. Kondisi ini memberikan pengertian bahwa sebagian besar lahan diusahakan kurang dari 2 kali tanam setahun. Tingkat produktifitas lahan sawah daerah ini cukup baik dengan rata-rata produksi 4,4 t/tahun, namun sebagian petani menggunakan lahan sawahnya untuk budidaya jagung pada musim kemarau. Petani menganggap usahatani jagung lebih menguntungkan dibandingkan padi sawah.

Dalam priode tahun 2005-2007 terjadi penurunan luas areal persawahan secara komulatif sebesar 1.287 ha.

Untuk mengurangi penurunan jumlah lahan sawah tersebut perlu dilakukan pencetakan sawah bukaan baru seluas 400-500 ha di Kabupaten Pasaman Barat pertahun dalam jangka waktu 8 tahun diharapkan mampu mengatasi peralihan fungsi lahan. Berdasarkan beberapa hasil penelitian dan pengalaman petani diketahui bahwa dibutuhkan waktu 4-5 tahun untuk mendapatkan produktifitas rata-rata 4 t/ha pada sawah bukaan baru. Petani membutuhkan biaya dan tenaga yang cuku besar untuk mencapai kemapanan produksi. Untuk itu, perlu ada pemberian bantuan ameliorasi lahan dan benih dari Pemerintah Daerah agar pencapaian peningkatan produksi tidak memberatkan petani. .Program perluasan areal tanam akan menjawab permasalahan penyusutan laan produktif yang kurang menguntungkan bagi kemandirian pangan daerah.

Selain itu dengan adanya aturan adat lokal berupa kesepakatan masyarakat nagari (desa) untuk mempertahankan lahan sawah seluas 700 ha sebagai lumbung pangan melalui hukum adat di Kecamatan Sungai Aur merupakan sala satu cara yang perlu dikembangkan di Pasaman Barat. Kepedulian masyarakat adat mengenai penyedian pangan lokal lebih efektif dalam menekan perubahan fungsi lahan sawah di daerah ini.

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Sesuai dengan tujuan penelitian ini, maka hasil penelitian yang telah dilakukan ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pengaruh alih fungsi lahan pertanian dari tanaman pangan/padi menjadi tanaman kelapa sawit di Kabupaten Pasaman Barat adalah signifikan dan berkorelasi negatif. Dimana semakin luas alih fungsi lahan pertanian untuk tanaman kelapa sawit akan mengakibatkan penurunan produksi tanaman pangan/padi . Dengan kata lain ketahanan pangan juga akan menurun.
2. Pengaruh alih fungsi lahan pertanian dari tanaman pangan/padi menjadi tanaman jagung di Kabupaten Pasaman Barat adalah signifikan dan berkorelasi negatif. Dimana semakin luas alih fungsi lahan pertanian untuk tanaman jagung akan mengakibatkan penurunan produksi tanaman pangan/padi . Dengan kata lain ketahanan pangan juga akan menurun.
3. Secara bersama-sama perubahan jumlah produksi tanaman kelapa sawit dan tanaman jagung yang meningkat akibat pengaruh alih fungsi lahan pertanian di Kabupaten Pasaman Barat akan mengakibatkan penurunan produksi tanaman pangan/padi.

6.2 Saran

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan dan kesimpulan di atas maka saran yang dapat penulis berikan antara lain :

1. Menyadari permasalahan tersebut, pemerintah harus menetapkan beberapa ketentuan di dalam kebijakan untuk membatasi dan atau mencegah konversi lahan pertanian yang subur menjadi penggunaan lahan nonpertanian di Kabupaten Pasaman Barat, salah satunya adalah kebijakan program cetak sawah baru.
2. Penentu kebijakan pertanian perlu memberikan penyuluhan dan sosialisasi kepada masyarakat untuk tetap memproduksi padi sebagai tanaman pokok. Sosialisasi tersebut lebih menekankan pemberdayaan alih fungsi lahan pertanian ke perkebunan hanya untuk alternatif pemenuhan kebutuhan masyarakat setempat sedangkan prioritas utama yakni peningkatan hasil tani di Kabupaten Pasaman Barat.
3. Diharapkan kepada pemerintah agar melakukan subsidi kepada petani. Subsidi yang dilakukan pemerintah adalah dengan membeli hasil produksi pertanian tanaman pangan dengan harga mahal dari petani dan kemudian dijual dengan harga murah. Jika pemerintah ikut campur tangan dalam hal pemasaran hasil pertanian petani, maka alih fungsi lahan khususnya lahan-lahan yang cocok untuk pertanian tidak akan dilakukan petani.

Daftar Pustaka

- Alamsyah. 2010. *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pengambilan Keputusan Atas Konversi Lahan Pertanian Menjadi Pemukiman Di Kota Medan*. Skripsi. Fakultas Pertanian Universitas Medan. Medan.
- Anugerah K, Fanny. 2005. *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Konversi Lahan Sawah Ke Penggunaan Non Pertanian Di Kabupaten Tangerang*. Skripsi. Fakultas Pertanian Institut Pertanian Bogor. Bogor.
- Bapeda. 2006. *Penyebab Alih Fungsi Lahan Pertanian Menjadi Lahan Non Pertanian*.
- Baumann, Duane D. Dkk. 1998. *Urban Water Demand Management And Planning*. New York: Mcgraw Hill Inc.
- Dinas Pertanian Ketahanan Pangan dan Peternakan Pasaman Barat tahun 2005-2007.
- Dinas Pertanian Ketahanan Pangan dan Peternakan Pasaman Barat tahun 2007.
- Dwidjono H. Darwanto. 2005. *Ketahanan Pangan Berbasis Produksi Dan Kesejahteraan Petani*. Ilmu Pertanian Vol. 12 No.2, 2005 : 152-164, Fakultas Pertanian Ugm Dan Mma-Ugm, Yogyakarta
- Fao. 1992. *Faostat*. Diakses Dari [Http://Faostat.Fao.Org](http://Faostat.Fao.Org)
- Fauzia, Lily. 2004. *Pengaruh Alih Fungsi Lahan Pertanian Terhadap Sosial Ekonomi Masyarakat (Studi Kasus Di Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang)*. Tesis. Fakultas Pertanian Universitas Medan. Medan.

- Gujarati, Damodar 1995. *Ekonometrika Dasar*, Terjemahan Sumarno Zain, Erlangga, Jakarta
- Gunanto, E.S., 2007. *Konversi Lahan Pertanian Mengkhawatirkan*. Diakses Dari [Http://Www.Tempointeraktif.Com](http://www.tempointeraktif.com)
- Ilham, Dkk, 2003. *Perkembangan Dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Konversi Lahan Sawah Serta Dampak Ekonominya*. Ipb Press. Bogor.
- Iqbal, M Dan Sumaryanto, 2007. *Strategi Pengendalian Alih Fungsi Lahan Pertanian Bertumpu Pada Partisipasi Masyarakat*. Pusat Analisis Sosial Ekonomi Dan Kebijakan Pertanian, Volume 5 No. 2, Juni 2007 : 167-182. Bogor.
- Irawan, B. Dan Friyatno, 2005. *Dampak Konversi Lahan Sawah Di Jawa Terhadap Produksi Beras Dan Kebijakan Pengendaliannya*. Pusat Penelitian Dan Pengembangan Sosial Ekonomi Pertanian. Badan Penelitian Dan Pengembangan Pertanian, R.I., Bogor.
- Irawan, B., A. Purwoto, C. Saleh, A. Supriatna, Dan N.A. Kirom. 2000. *Pengembangan Model Kelembagaan Reservasi Lahan Pertanian*. Laporan Hasil Penelitian. Pusat Penelitian Sosial Ekonomi Pertanian Badan Penelitian Dan Pengembangan Pertanian Departemen Pertanian. Bogor.
- Jamal, E. 2000. *Analisis Ekonomi Dan Kelembagaan Alih Fungsi Lahan Sawah Ke Penggunaan Non Pertanian Di Kabupaten Karawang, Jawa Barat*. Thesis Program Pasca Sarjana. Ipb. Bogor.

- Lestari, T., 2009. *Dampak Konversi Lahan Pertanian Bagi Taraf Hidup Petani*. Makalah Kolokium. Deprtemen Sains Komunikasi Dan Pengembangan Masyarakat Tanggal 21 April 2009. Intitut Pertanian Bogor.
- Maleha & Adi Sutanto. 2006. *Kajian Konsep Ketahanan Pangan*. Jurnal Protein Volume 13 No 2 Tahun 2006 : 194-202. Jurusan Peternakan Fakultas Peternakan Universitas Palangkaraya Kalimantan Tengah Dan Universitas Muhammadiyah Malang.
- Nasoetion, L,I, Dan Winoto, J. 1996. *Masalah Alih Fungsi Lahan Pertanian Dan Dampaknya Terhadap Keberlangsungan Swasembada Pangan*. Prosiding Lokakarya: Persaingan Dalam Pemanfaatan Sumberdaya Lahan Dan Air. Pusat Penelitian Sosial Ekonomi Pertanian Dan Ford Fondation.Jakarta.
- Nugroho, I *Et Al*. 2004. *Pembangunan Wilayah : Perspektif Ekonomi, Sosial Dan Lingkungan*. Jakarta: Pustaka Lp3es.
- Rahmanto, Dkk, 2002. *Persepei Mengenai Multifungsi Lahan Sawah Dan Implikasinya Terhadap Alih Fungsi Kepenggunaan Nonpertanian*. Pusat Analisis Sosial Ekonomi Dan Kebijakan Pertanian. Litbang Pertanian. Bogor.
- Sitanggang, Edi Marli Dan Burhan Je Marbun. 2007. *Perspektif Pangan Masa Depan*. Diakses Dari [Http://Sinarharapan.Co.Id](http://Sinarharapan.Co.Id).
- Sjafrizal, 2008. *Ekonomi Regional (Teori Dan Aplikasi)*. Baduose Media. Padang

- Solihah, Neneng. 2002. *Dampak Alih Fungsi Lahan Sawah Ke Penggunaan Non Sawah Terhadap Pendapatan Petani Di Kabupaten Bogor*. Skripsi. Fakultas Pertanian Institut Pertanian Bogor. Bogor.
- Sudirja, R., 2008. *Mewujudkan Kedaulatan Pangan Melalui Kebijakan Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan*. Disampaikan Pada Seminar Regional Musyawarah Kerja Badan Eksekutif Himpunan Mahasiswa Ilmu Tanah Indonesia Wilayah Ii, Gedung Student Centre Faperta Unpad-Jatinangor, 29 Januari 2008. Bandung.
- Suharjo. 1988. Suhardjo. 1988. *Perencanaan Pangan Dan Gizi*. Bumi Aksara. Bogor.
- Sumaryanto, Dkk. 2001. *Analisis Kebijakan Konversi Lahan Sawah Ke Penggunaan Non Pertanian*. Pusat Penelitian Sosial Ekonomi Pertanian, Bekerjasama Dengan Proyek Pembinaan Kelembagaan Peranian Nasional. Bogor.
- Syahyuti, 2007. *Kebijakan Lahan Abadi Untuk Pertanian Sulit Diwujudkan*. Diakses Dari [Http://Www.Litbang.Deptan.Go.Id](http://www.litbang.deptan.go.id)
- Syam, A., M. Syukur, N. Ilham Dan Sumedi. 2000. *Baseline Survey Program Pemberdayaan Petani Untuk Mencapai Ketahanan Pangan*. Laporan Penelitian. Pusat Penelitian Sosial Ekonomi Pertanian, Badan Penelitian Dan Pengembangan Pertanian, Departemen Pertanian. Bogor.
- Tambunan, Tulus. 2008. *Ketahanan Pangan Di Indonesia, Mengidentifikasi Beberapa Penyebab*. Universitas Trisakti. Jakarta
- UU No 3 Tahun 2004 *Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah*.

UU No 18 Tahun 2004 *Tentang Perkebunan*.

UU No 7 Tahun 1996 *Tentang Pangan*.

Wicaksono, R.B., 2007. Konversi Lahan Sawah Ke Non Pertanian Dalam Perkembangan Kota Nganjuk Dan Pengaruhnya Terhadap Perubahan Mata Pencaharian Dan Pendapatan Petani. Diakses Dari [Http://www.Lib.Itb.Ac.Id](http://www.lib.itb.ac.id)

Widjanarko, Dkk, 2006. *Aspek Pertahanan Dalam Pengendalian Alih Fungsi Lahan Pertanian (Sawah)*. Prosiding Seminar Nasional Multifungsi Lahan Sawah : 22-23. Pusat Penelitian Dan Pengembangan Bpn. Jakarta.

Winoto, J. 1995. *Impacts Of Urbanization On Agricultural Development In The Northern Coastal Region Of West Java*. Michigan State University And University Microfilm, Inc., Usa.

Winoto, J. 2005. *Kebijakan Pengendalian Alih Fungsi Tanah Pertanian Dan Implementasinya*. Kerjasama Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Dengan Pusat Studi Pembangunan Pertanian Dan Pedesaan (Institut Pertanian Bogor). Jakarta.

Lampiran 1**Data yang diolah tahun 2008-2009**

Kecamatan	Perubahan jumlah produksi padi (ΔY)	Perubahan jumlah produksi sawit (ΔS)	Perubahan jumlah produksi jagung (ΔJ)
Sungai Beremas	1363	173	285
Ranah Batahan	2921	173	2306
Koto Balingka	383	248	3501
Sungai Aua	1106	466	353
Lembah Melintang	4517	242	28753
Gunung Tuleh	357	718	1749
Talamau	1468	90	110
Pasaman	1266	766	2384
Luhak Nan Duo	1249	251	1090
Sarasak Ranah Pasisie	213	176	242
Kinali	6030	544	76944

Regression

Descriptive Statistics

	Mean	Std. Deviation	N
perubahan produksi padi	1924.82	1839.210	11
perubahan produksi sawit	414.27	232.300	11
perubahan produksi jagung	1.07E4	23479.848	11

Correlations

			perubahan produksi padi	perubahan produksi sawit	perubahan produksi jagung
Pearson Correlation	perubahan padi	produksi	1.000	-.079	.883
	perubahan sawit	produksi	-.079	1.000	.253
	perubahan jagung	produksi	.883	.253	1.000
Sig. (1-tailed)	perubahan padi	produksi	.	.409	.000
	perubahan sawit	produksi	.409	.	.226
	perubahan jagung	produksi	.000	.226	.
N	perubahan padi	produksi	11	11	11
	perubahan sawit	produksi	11	11	11
	perubahan jagung	produksi	11	11	11

Variables Entered/Removed^b

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	perubahan produksi jagung, perubahan produksi sawit ^a		Enter

a. All requested variables entered.

b. Dependent Variable: perubahan produksi padi

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.937 ^a	.878	.847	719.696

a. Predictors: (Constant), perubahan produksi jagung, perubahan produksi sawit

b. Dependent Variable: perubahan produksi padi

ANOVA^b

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	2.968E7	2	1.484E7	28.654	.000 ^a
	Residual	4143701.652	8	517962.706		
	Total	3.383E7	10			

a. Predictors: (Constant), perubahan produksi jagung, perubahan produksi sawit

b. Dependent Variable: perubahan produksi padi

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	2174.270	460.237		4.724	.001
	perubahan produksi sawit	-2.556	1.013	-.323	-2.524	.036
	perubahan produksi jagung	-.076	.010	-.965	-7.544	.000

a. Dependent Variable: perubahan produksi padi

Residuals Statistics^a

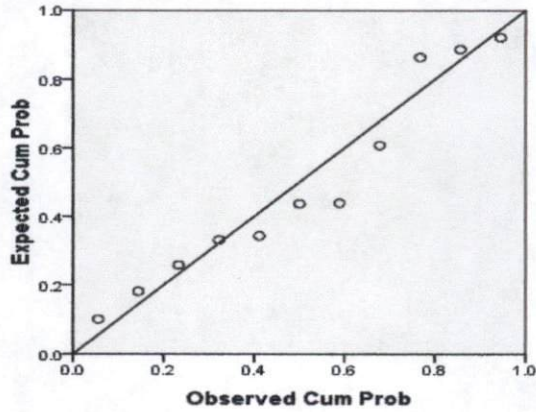
	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation	N
Predicted Value	396.39	6343.57	1924.82	1722.883	11
Residual	-918.421	1014.667	.000	643.716	11
Std. Predicted Value	-.887	2.565	.000	1.000	11
Std. Residual	-1.276	1.410	.000	.894	11

a. Dependent Variable: perubahan produksi padi

Charts

Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual

Dependent Variable: perubahan produksi padi



Scatterplot

Dependent Variable: perubahan produksi padi

